

**BALAI BESAR PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**



LAPORAN KINERJA 2023



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

LAPORAN KINERJA
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN 2023

Tim Penyusun :

Laila Kadar, SE, M.Si

Ir. Ari Murtiningsih

Tania Pra Dhani, STP, MM

Widia Siska, SP, M.Si

Sabilal Fahri, S.Pi, M.Si

Bambang Suryaningrat, SP



BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 18 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Ketua Kelompok PE PSI PKH



Ketua Kelompok PE PSI TP



Ketua Kelompok PE BBPSI Mektan

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BBPSIP memiliki tugas menerapkan standar instrumen pertanian sehingga BBPSIP juga berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPSIP Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BBPSIP selanjutnya.



Bogor, Januari 2024
Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) merupakan salah satu Unit Kerja (UK) yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BBPSIP memiliki tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BBPSIP diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BBPSIP TA. 2023.

Sesuai dengan Renstra BBPSIP tahun 2023-2024, pada tahun 2023 BBPSIP mengimplementasikan program utama BSIP yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **127,41%**. Rata-rata nilai capaian di atas 100 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BBPSIP telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023, pagu anggaran lingkup BBPSIP sebesar Rp264.157.413.000,00. Namun adanya penyesuaian anggaran lingkup BBPSIP mengakibatkan perubahan pagu anggaran per Desember 2023 menjadi Rp353.771.118.000,00, dan realisasi anggaran Lingkup BBPSIP hingga 31 Desember 2023 berdasarkan data SPAN sebesar Rp339.974.584.461,00 (96,1%).

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan diperbaiki oleh seluruh jajaran BBPSIP dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai Besar Penerapan.....	3
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1. Visi.....	7
2.2. Misi.....	7
2.3. Tujuan.....	7
2.4. Sasaran.....	8
2.5. Kegiatan BBPSIP.....	9
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Capaian Kinerja.....	11
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	13
3.1.2. Perbandingan Kinerja Antar Tahun.....	31
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Target Renstra Tahun 2023-2024.....	34
3.1.4. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi Keberhasilan.....	36
3.1.5. Capaian Kinerja BBPSIP Lainnya.....	37
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	39
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	44
3.2.1. Hibah Langsung Luar Negeri.....	49
3.2.2. Pinjaman Luar Negeri.....	50
IV. PENUTUP.....	51
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja.....	51
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Program, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja dan Target 2023-2024 sesuai Renstra BBPSIP	8
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja BBPSIP Tahun 2023	10
Tabel 3.	Pengukuran Kinerja BBPSIP Tahun 2023	12
Tabel 4.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.....	13
Tabel 5.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan Tahun 2023	14
Tabel 6.	Realisasi SNI yang Didiseminasikan Tahun 2023	14
Tabel 7.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	18
Tabel 8.	Realisasi Lembaga Penerap SNI Tahun 2023	18
Tabel 9.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Produksi Instrumen Pertanian (unit).....	22
Tabel 10.	Realisasi Perbanyak Benih Tahun 2023	22
Tabel 11.	Realisasi Perbanyak Benih Padi Tersertifikasi Tahun 2023.....	23
Tabel 12.	Realisasi Perbanyak Benih Jagung Tersertifikasi Tahun 2023 ..	25
Tabel 13.	Realisasi Perbanyak Benih Jeruk Tersertifikasi Tahun 2023	25
Tabel 14.	Realisasi Perbanyak Benih Kakao, Kelapa dan Kopi Tersertifikasi Tahun 2023	26
Tabel 15.	Perkembangan Perbanyak Bibit Domba dan Ayam KUB Tersertifikasi Tahun 2023.....	27
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.....	28
Tabel 17.	Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian oleh Tim Assessor	29
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023...	30
Tabel 19.	Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Penerapan Tahun 2023	30
Tabel 20.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023	33
Tabel 21.	Capaian Kinerja BBPSIP Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023-2024.....	35
Tabel 22.	Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian 2023	41
Tabel 23.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen Rincian <i>Output</i> (KRO) Kegiatan Lingkup BBPSIP Tahun 2023 (data SPM).....	44
Tabel 24.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Lingkup BBPSIP 31 Desember 2023.....	46
Tabel 25.	Realisasi Anggaran per BPSIP Tahun 2023	47

Tabel 26. Hibah Langsung Luar Negeri Lingkup BBPSIP 2023.....	49
Tabel 27. Pinjaman Luar Negeri Lingkup BBPSIP 2023.....	50
Tabel 28. Lokasi pelaksanaan ICARE Tahun 2023	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem Perencanaan Nasional 3
Gambar 2. Nilai SMART Balai Besar Penerapan Tahun 2023 pada Aplikasi
SMART..... 31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSIP Berdasarkan Permentan Nomor 13/Permentan/2023.....	55
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal).....	56
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi I)	58
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi II).....	61
Lampiran 5. Renaksi BBPSIP Tahun 2023	64
Lampiran 6. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2023	70

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BBPSIP tahun 2023 merupakan LAKIN tahun pertama dalam melaksanakan kegiatan di BSIP.

LAKIN BBPSIP disusun mengacu pada Renstra BSIP Tahun 2022 – 2024. Dasar hukum penyusunan LAKIN BBPSIP Tahun 2023 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas, Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No 40/2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL, dan PMK 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KL.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPSIP menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

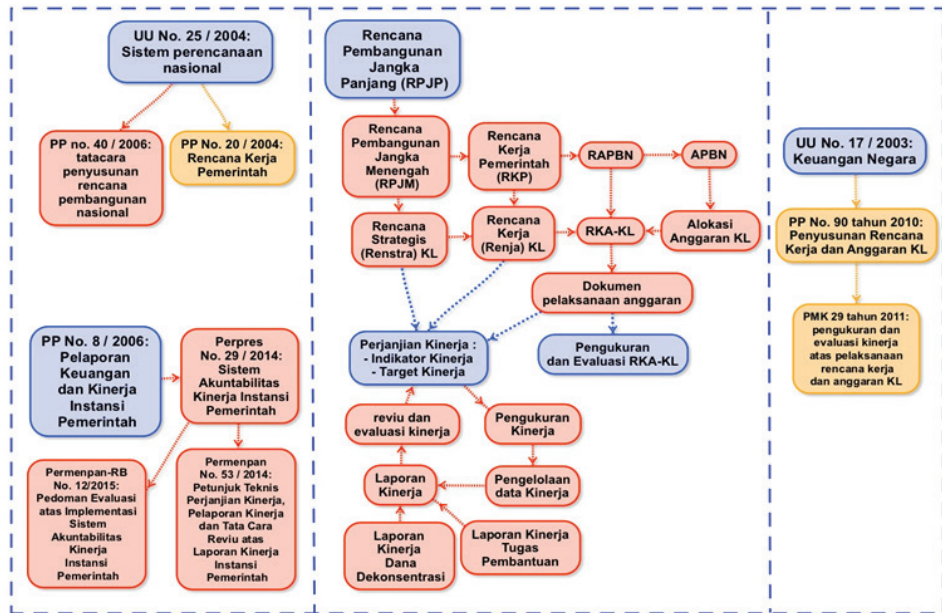
Salah satu cara untuk melihat kinerja suatu lembaga dapat dievaluasi melalui LAKIN. Dalam pelaksanaannya evaluasi SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Dalam implementasinya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi baik internal dan eksternal. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau benchmark tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan. Sistem perencanaan nasional dapat dilihat pada Gambar 1, diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi lima komponen yaitu: 1) Perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) yang terdiri dari rencana, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja; 2) Pengukuran kinerja (bobot penilaian 25%, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; 3) Pelaporan kinerja (bobot penilaian 15%) yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja; 4) Evaluasi kinerja (bobot penilaian 10%) yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya serta 5) Capaian kinerja (bobot penilaian 20%) yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja tahun berjalan.



Gambar 1. Sistem Perencanaan Nasional

Kriteria dalam penilaian evaluasi LAKIN dikategorikan menjadi 7 kategori, yaitu: 1) AA (sangat memuaskan) skor > 90–100, 2) A (memuaskan) skor 80–90, 3) BB (sangat baik) skor 70–80, 4) B (baik) skor 60–70, 5) CC (memadai) skor 50–60, 6) C (kurang) skor >30–50, dan 7) D (sangat kurang) skor < 30.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai Besar Penerapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 13/Permentan/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tugas utama BBPSIP adalah melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BBPSIP memiliki fungsi yaitu : 1) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian; 2) Pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian; 3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi; 4) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional; 5) Pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian; 6) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian; 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan

standar instrumen pertanian; dan 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSIP.

Dalam rangka mensinergikan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian, maka BBPSIP mengkoordinasikan kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, BBPSIP diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) seluruh Indonesia. Struktur Organisasi BBPSIP berdasarkan Permentan No 13/Permentan/2023 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi perubahan kebijakan pemerintah terhadap kelembagaan dengan tulus penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) dialihkan dari tulus lembaga riset di Kementerian/Lembaga, termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Perpres 78 tahun 2021 mendorong Kementan melakukan upaya transformasi kelembagaan untuk memastikan kinerja kementerian tetap dapat dipertahankan sekaligus menjawab tantangan kebutuhan pembangunan pertanian yang dinamis.

Suatu momen yang bersejarah dengan lahirnya BSIP pada tanggal 21 September 2022 diperkuat dengan terbitnya Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, BSIP merupakan bagian dari unit eselon I yang bernaung di bawah Kementan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan 5 (lima) fungsi, yaitu: 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; 2) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; 4) Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2024 telah dilakukan pengukuhan kelompok subtansi dan ketua tim kerja yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BSIP Nomor 32/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Kelompok Subtansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan surat keputusan tersebut struktur organisasi BBPSIP hanya mempunyai dua pejabat struktural yaitu Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Kepala Bagian Tata Usaha. Pimpinan tertinggi adalah Kepala BBPSIP, yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga,

Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara dan Ketua Tim Kerja Kepegawaian. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi dibantu oleh Ketua Tim Kerja Program dan Ketua Tim Kerja Evaluasi. Ketua Kelompok Penerapan dan Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian dibantu oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi dan Ketua Tim Kerja Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Seiring dengan kemajuan pembangunan, peningkatan dan kemajuan peradaban masyarakat, termasuk pengaruh akses informasi global. Semakin maju masyarakat, tingkat kesadaran terhadap perlunya standar semakin meningkat sehingga proses standardisasi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, termasuk hasil sektor pertanian juga akan semakin meningkat. Standardisasi dan penilaian kesesuaian atas barang, jasa, sistem, proses, dan personal pelaksana diperlukan untuk memastikan persyaratan mutunya terpenuhi ketika sampai kepada masyarakat. Standardisasi dan penilaian kesesuaian juga merupakan faktor penting bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Dengan bergabungnya BSIP diharapkan kinerja Kementan akan terus dapat dipertahankan melalui penyediaan dan penerapan standar instrumen pertanian (Agrostandar) dalam rangka memacu peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia. Standardisasi bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan tujuannya menaikkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun global. Diharapkan BSIP ke depan dapat berkontribusi pada pembangunan pertanian melalui produk dan sistem pertanian yang terstandar. Sesuai arahan Menteri Pertanian BSIP agar menyiapkan benih dan bibit terstandar-tersertifikasi sehingga dapat mengoptimalkan produksi. BSIP juga mencoba mengejar *quick win* yang dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2023.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BBPSIP secara hirarkis merupakan *Business Unit* BSIP. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, visi dan misi yang disusun BBPSIP mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian, serta visi dan misi BSIP 2022 – 2024 yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, pada visi dan misi yang ditetapkan harus mengakomodir situasi dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan perdesaan.

Setiap unit kerja dituntut untuk memiliki *standard performance* sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, serta mempunyai konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen yang ditetapkan di dalam Renstra BBPSIP 2023-2024. Proses penyusunan Renstra dilakukan secara bertahap dan terstruktur yang melibatkan manajemen dan fungsional BBPSIP. Dalam Renstra BBPSIP 2023-2024 bahwa Renstra dijabarkan dalam misi, tujuan, indikator kinerja, sasaran serta arah kebijakan dan strategi.

2.1. Visi

Visi BBPSIP adalah "Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian maju, mandiri dan modern".

2.2. Misi

Misi BBPSIP adalah: 1) Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri; 2) Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh, serta 3) Melaksanakan birokrasi BBPSIP yang transparansi, profesionalisme dan akuntabel.

2.3. Tujuan

Tujuan BBPSIP adalah: 1) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan : a) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan b) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 3) Terwujudnya reformasi birokrasi BBPSIP yang efektif dan efisien

dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator nilai pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM BBPSIP, dan 4) Terkelolanya anggaran BBPSIP yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator nilai kinerja anggaran BBPSIP.

2.4. Sasaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BBPSIP, maka sasaran BBPSIP adalah: 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran, indikator kinerja dan target capaian untuk Tahun 2023-2024 sesuai Renstra BBPSIP Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja dan Target 2023-2024 sesuai Renstra BBSPIP

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Alokasi Anggaran (Rp 000)	
				2023	2024	2023	2024
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						46.259.611	44.150.000
Kegiatan : Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian							
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian						
		1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	SNI	34	34		
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	Lembaga	34	34		
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas						32.900.000	41.525.000
Kegiatan : Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar							
	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan	Unit	167.610,5	298.927		
Program Dukungan Manajemen						284.919.962	278.531.375
Kegiatan : Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian							

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Alokasi Anggaran (Rp 000)	
	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	81	82		
	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	91,5	91,5		

2.5. Kegiatan BBPSIP

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) TA 2023, BBPSIP dan BPSIP seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penerapan standar instrumen pertanian melalui beberapa kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) Lingkup BBPSIP tahun 2023.

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perencanaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan *stakeholder (bottom up)* diselaraskan dan mengakomodasi program yang bersifat *top down* sehingga kebijakan perencanaan anggaran ditetapkan sesuai rencana kinerja yang disepakati melalui Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BBPSIP. Kinerja BBPSIP dihitung berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala BBPSIP sebagai Kepala Unit Kerja. Perjanjian Kinerja tersebut telah mengakomodasi Perjanjian Kinerja seluruh satker Lingkup BBPSIP. Perjanjian Kinerja yang digunakan menjadi acuan penyusunan LAKIN Tahun 2023 merupakan Perjanjian Kinerja terakhir yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023.

Perjanjian Kinerja BBPSIP Tahun 2023 awal ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2022, dengan total pagu anggaran sebesar Rp264.157.413.000,00, pada Progam Dukungan Manajemen (Lampiran 2). Pada awalnya program yang ditetapkan hanya terdiri dari satu program yang merupakan program manajemen, disebabkan belum adanya nomenklatur dalam struktur penganggaran di BSIP.

Seiring dengan terbitnya Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, perlu dilakukan revisi Perjanjian Kinerja per tanggal 17 Mei 2023 dengan total pagu anggaran sebesar Rp366.079.573.000,00. Secara rinci anggaran masing-masing program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp48.259.611.000,00, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp32.900.000.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp284.919.962.000,00, yang dapat dilihat pada Lampiran 3.

Selanjutnya, dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran lingkup BSIP, berdampak pula terhadap target dan anggaran lingkup BBPSIP, salah satunya perubahan target *output* perbenihan lingkup BBPSIP. Selain itu, BBPSIP mendapatkan anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yaitu *Asian Food And Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)* yang harus diakomodir ke dalam DIPA BBPSIP, sehingga perlu dilakukan revisi Perjanjian Kinerja yang ke-2 per tanggal 28 Desember 2023 dengan total pagu anggaran sebesar Rp353.771.118.000,00 mencakup Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp59.107.278.000,00, Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp32.474.589.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp262.189.251.000,00 yang dapat dilihat pada Lampiran 4. Sasaran dan indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja revisi terakhir dapat dilihat pada Lampiran 4.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BBPSIP Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	34
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	34
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian standar yang dihasilkan (Unit)	167.610,5
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	81
4.	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91,5

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

BBPSIP selalu berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (*proses*), serta keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BBPSIP.

Pengukuran IKU dilakukan melalui perhitungan rata-rata capaian kinerja yang merupakan gabungan dari beberapa IKSK/IKU yang sifatnya maximize sehingga nilai kinerjanya akurat (menggunakan polarisasi dan perspektif). Pengukuran IKU masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI); 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga); 3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit); 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai) dan 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai).

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan IKU dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara periodik beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan membuat matriks Rencana Aksi (Renaksi) triwulanan. Renaksi triwulanan BBPSIP Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 5.

Pada tahun anggaran 2023, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2023-2024, BBPSIP telah menetapkan empat sasaran yang akan dicapai yaitu : 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima dan 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel yang berkualitas.

Selanjutnya, keempat sasaran tersebut diukur dengan lima indikator kinerja *output* berupa: (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga), (3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit), (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai), dan (5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Pengukuran kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan manual IKSK Balai Besar Penerapan Tahun 2023 yang dapat dilihat pada Lampiran 6.

Penetapan kategori keberhasilan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang kriteria ukuran keberhasilan pencapaian kinerja lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) sangat berhasil jika capaian >100%, 2) berhasil jika capaian 80-100%; 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%, dan 4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Tabel 3. Pengukuran Kinerja BBPSIP Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	34	55	161,76
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	34	53	155,88
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian standar yang dihasilkan	167.610,5	189.172,99	112,86
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	81	85,35	105,37
4.	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	91,5	92,57	101,17
Total					127,41

Berdasarkan Tabel 3, capaian indikator kinerja BBPSIP tahun 2023 sebesar 127,41% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Secara keseluruhan untuk sasaran BBPSIP masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai

lebih dari 100%. Indikator dimaksud adalah: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan; 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 3) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan 5) Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesuai yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Disamping itu keberhasilan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup BBPSIP.

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Metode yang dilakukan dengan memantau kemajuan capaian kerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian terdiri dari dua indikator kinerja yaitu: (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	SNI	34	55	161,76
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	Lembaga	34	53	155,88

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, dilihat berdasarkan dua indikator kinerja sasaran. Indikator pertama yaitu jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan target 34 SNI, capaian jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebesar 55 SNI. Indikator kedua yaitu jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target sebesar 34 lembaga, capaian jumlah lembaga yang menerapkan sebesar 53 lembaga.

Indikator Kinerja 1:

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebanyak 55 SNI dari target 34 SNI, nilai capaian kinerja indikator yang diperoleh sebesar 161,76% seperti dapat dilihat pada Tabel 5. Secara rinci realisasi SNI yang didiseminasikan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	Jumlah	34	55	161,76

Tabel 6. Realisasi SNI yang Didiseminasikan Tahun 2023

No	Satker BPSIP	SNI yang Didiseminasikan	Jenis SNI	Komoditas	Sasaran Diseminasi	
1	NAD	1	PTM Permentan No. 27 Tahun 2021	Proses	Benih kopi arabika gayo	Petani kopi, penangkar benih dan penyuluh pertanian
		2	SNI 6128-2020 (Beras)	Produk	Beras	Pelaku Usaha (Penggilingan Padi)
2	Sumatera Utara	3	SNI 01-3542-2004 (Kopi Bubuk)	Produk	Kopi Arabika	Pelaku Usaha, UMKM, Petani
3	Riau	4	SNI 7352-1-2015 (Bibit kambing Peranakan Etawah)	Produk	Kambing PE	Pelaku Usaha, UMKM, Peternak
		5	SNI 8818:2019 (Pakan konsentrat kambing perah)	Produk	Kambing Sapera	Pelaku Usaha, UMKM, Peternak
		6	SNI 3951:2018 (Susu Pasteurisasi)	Produk	Susu	Pelaku Usaha, UMKM, Peternak
		7	SNI 3157 : 2002 (Standar Mutu Biji Sorgum)	Produk	Sorgum	Pelaku usaha, Petani

No	Satker BPSIP	SNI yang Didiseminasikan	Jenis SNI	Komoditas	Sasaran Diseminasi	
4	Jambi	8	SNI 19-7030-2004 (Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik)	Produk	Pupuk Kompos	Kelompok tani, stakeholder, pelajar
		9	SNI 6234 : 2015 (Benih Kedelai)	Produk	Benih Kedelai	Petani
		10	SNI 3166 : 2009 (Nanas)	Produk	Nanas	Pelaku usaha, petani UMKM
		11	SNI 3450 : 1997 (Pinang)	Produk	Pinang	Pelaku usaha, petani UMKM
5	Sumatera Barat	12	SNI. 01-3211-1992 (Standar Mutu Buah Manggis)	Proses	Manggis	Kelompok Tani, pedagang pengumpul, eksportir & Stakeholder
		13	SNI 01 - 3391 - 2000 (Gambir)	Proses	gambir	Kelompok Tani, pedagang pengumpul, eksportir & Stakeholder
6	Bangka Belitung	14	SNI 4480:2026 (Cabai)	Produk	Cabai	Penyuluh
7	Sumatera Selatan	15	SNI 8964 2021: (Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk)	Produk	Kopi sangrai, kopi bubuk	Kelompok tani dan pelaku usaha
8	Lampung	16	SNI 6944-2015 (Benih Jagung)	Produk	Jagung	kelompoktani
		17	SNI 8172-2015 (Benih Padi)	Produk	Padi	Kelompok Tani, UMKM
		18	SNI 01-7155-2006 (Benih Lada)	Produk	Lada	Kelompok tani
9	Bengkulu	19	SNI 3743:2021 (Gula Palma)	Produk	Gula aren	Kelompok Tani, Penyuluh, UMKM
		20	SNI 3544:2013 (Sirup)	Produk	Sirup jeruk Kalamansi	Kelompok Tani, Penyuluh, UMKM
10	Banten	21	SNI 01-3921-1995 (Kacang Tanah)	Sistem	Tanaman Pangan	Petani, Penyuluh, POPT, Pelaku usaha
		22	SNI 4483-2013 (Jagung Pakan Ternak)	Produk	Jagung	Petani, Penyuluh, POPT, Pelaku usaha
11	DKI Jakarta	23	SNI 01-3168-1992 (Alpoket)	Produk	Alpoket	Kelompok tani, pelaku usaha, pelajar, masyarakat umum, stakeholder terkait
12	Jawa Barat	24	SNI 3211-2009 (Manggis)	Produk	Manggis	Kelompok tani dan Petugas Lapang
13	Jawa Tengah	25	SNI 8405-1:2017 (Ayam KUB)	Produk	Ayam KUB	Peternak, Kelompok Ternak, Lembaga, pemangku kebijakan
14	Jogyakarta	26	SNI 8284 2016 (Penerapan Sistem Irigasi)	Proses	Padi	Pelaku usaha, Poktan, KWT, mahasiswa
		27	SNI 15886 2021 (Standar Jaringan Irigasi)	Proses	Jagung	Pelaku usaha, Poktan, KWT, mahasiswa

No	Satker BPSIP	SNI yang Didiseminasikan	Jenis SNI	Komoditas	Sasaran Diseminasi
		28 SNI 7604 2010 (Standar Pengelolaan Screen House)	Proses	Anggur	Pelaku usaha, Poktan, KWT, mahasiswa
15	Jawa Timur	29 SNI 6233: 2015 (Padi)	Proses	Padi	Petani, Penangkar, Petugas, Penyuluh dan Mahasiswa
16	Bali	30 SNI-7763 :2018 (Pupuk Organik Padat)	Proses	Padi dan Jagung	Petani, kelompok tani, penyuluh, <i>stakeholder</i> pertanian
		31 SNI 482:2018 (Kapur Untuk Pertanian)	Produk	Padi dan Jagung	Petani, kelompok tani, penyuluh, <i>stakeholder</i> pertanian
17	NTB	32 SNI 6729-2016 (Sistem Pertanian Organik)	proses	Bawang merah	Penyuluh, petani
		33 SNI 01-7157-2006 (Kelapa Dalam)	produk	Kelapa	Pengunjung, petani, penyuluh
18	NTT	34 SNI 7651-4:2020 (Bibit Sapi Potong Bali)	Produk	Sapi Bali,	Kelompok tani, penyuluh dan Pelaku Usaha
19	Kalimantan Barat	35 SNI 3140-1:2020 (Gula Kristal mentah/raw sugar)	Produk	Tebu	Petani/ pelaku usaha, petugas dan masyarakat
		36 SNI 3140.3:2020 (Gula Kristal Putih)	Produk	Tebu	Petani/ pelaku usaha, petugas dan masyarakat
		37 SNI 13-7168-2006 (Syarat mutu zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian)	Produk	Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Petani/ pelaku usaha, dan masyarakat
		38 SNI 3741:2013 (Minyak goreng)	Produk	Sawit	Petani/ pelaku usaha, dan masyarakat
20	Kalimantan Tengah	39 SNI 3920:2013 (Standar Mutu Jagung)	Produk	Jagung	Kel.Tani, UMKM, Pelaku usaha
21	Kalimantan Selatan	40 SNI 3178:2013 (Dedak Padi - Bahan Pakan Ternak)	Produk	Peternakan	Kelompok tani (petani, peternak), UMKM
22	Kalimantan Timur	41 SNI.1. 2323:2008 (Biji Kakao)	Proses	Kakao	Kelompok tani, gapoktan, petani penangkar, pengusaha
		42 SNI 7651.1:2011 (Bibit Ayam KUB)	Proses	Ayam KUB	Kelompok tani, peternak, PPL, UMKM
23	Sulawesi Utara	43 SNI 01-4315-1996 (Keripik pisang)	Proses	Pisang	Kelompok tani, mahasiswa, UMKM, pelaku usaha
		44 SNI 4320-1996 (Minuman serbuk tradisional)	Produk	Pala	Kelompok tani, mahasiswa, UMKM, pelaku usaha

No	Satker BPSIP	SNI yang Didiseminasikan	Jenis SNI	Komoditas	Sasaran Diseminasi
		45 SNI S110268-65 (Mutu gula semut)	Produk	Gula Semut	Kelompok tani, mahasiswa, UMKM, pelaku usaha
24	Gorontalo	46 6128:2020 (Beras)	Produk	Padi	Petani, peternak, UMK, Penyuluh, PBT, Pelaku Usaha, Teknisi, KTNA
25	Sulawesi Tengah	47 SNI Biji Kopi (SNI_2907-2008)	Produk	kopi	kelompok tani, penyuluh dan <i>stakeholders</i>
26	Sulawesi Selatan	48 SNI 8969:2021 (Indonesian good agricultural practices (IndoGAP))	Sistem	Padi	Kelompok Tani
27	Sultra	49 SNI 6233:2015 (Persyaratan Mutu Padi Hibrida)	Produk	Padi	Petani Penangkar, Kelompok Tani, Penyuluh dan <i>stakeholders</i>
28	Maluku	50 SNI 0006-2015 (Pala Banda)	Produk	Pala	Petani, kelompok tani, penyuluh, pelajar, mahasiswa, instansi terkait
29	Papua	51 SNI 3729 : 2008 (Mutu Pati Sagu)	Produk	Sagu	KWT, UMKM
30	Maluku Utara	52 SNI IndoGAP 8969:2021	Produk	Hortikultura	Kelompok tani dan pelaku usaha
31	Papua Barat	53 SNI 06:2021 (Pala Fakfak)	Produk	Perkebunan	Pelaku usaha (Eksportir), petani
32	Sulawesi Barat	54 SNI 6232:2015 (Produksi Benih Sumber Bersari Bebas (komposit))	Proses	Jagung	kelompok tani, UMKM
33	Kepulauan Riau	55 SNI : 6233 :2015 (Benih Padi Inbrida)	Proses	Padi	Kelompok tani

Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyebarkan hasil standardisasi instrumen pertanian kepada *stakeholders*. Target jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang didiseminasikan sebanyak 34 SNI. Hasil identifikasi di BPSIP menunjukkan bahwa SNI yang didiseminasikan berjumlah 55 SNI, meliputi 38 SNI produk, 14 SNI proses, dan 3 SNI sistem. SNI yang didiseminasikan merupakan SNI dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan peternakan yang terdiri dari beberapa komoditas antara lain padi, bawang merah, cabai merah, kakao, kopi, pala dan ayam KUB.

Dalam kegiatan ini, sasaran diseminasi ditujukan kepada berbagai kelompok, antara lain kelompok tani, kelompok peternak, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, penyuluh, UMKM, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), masyarakat umum, pemangku kebijakan, penangkar padi, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP). Dengan diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian kepada berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai standar instrumen

pertanian dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas, keamanan, dan daya saing produk pertanian, serta mendorong pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Permasalahan secara umum belum tersosialisasinya secara luas istilah standar produk atau sistem pertanian kepada petani, penyuluh, pemangku kebijakan. Hal ini dapat dilihat masih banyak produk pertanian belum sesuai dengan SNI dan sistem budidaya belum sesuai dengan standar. Selanjutnya dengan adanya sosialisasi diseminasi SNI dapat meningkatkan pemahaman akan standarisasi pertanian.

Indikator Kinerja 2:

Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)

Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian ditargetkan 34 lembaga dengan capaian 53 lembaga, nilai capaian kinerja indikator sebesar 155,88% seperti dapat dilihat pada Tabel 7. Secara rinci realisasi lembaga penerap SNI Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen yang dihasilkan (Lembaga)	Lembaga	34	53	155,88

Tabel 8. Realisasi Lembaga Penerap SNI Tahun 2023

No	Satker BPSIP	Lembaga Penerap		SNI yang diterapkan
1	NAD	1	Koperasi Baburrayyan	SNI 01-2907-2008 (Biji Kopi)
2	Sumut	2	IKM Motung	SNI 01-3542-2004 (Kopi Bubuk)
		3	IKM Muda Kopi	SNI 01-3542-2004 (Kopi Bubuk)
3	Sumatera Barat	4	Kelompok Tani Inovasi	SNI 2323 :2008/Amd1: 2010 (Biji kakao Amandemen)
		5	IKM Chokato	SNI 2323 :2008/Amd1: 2010 (Biji kakao Amandemen)
4	Riau	6	IKM Seroja	SNI 8370-2018 (Keripik Buah)
		7	IKM Restu	SNI 8370-2018 (Keripik Buah)
		8	Usaha Penggilingan Padi	SNI 6128:2020 (Beras)
5	Jambi	9	MPIG Pinang Betara Jambi	SNI 01-3450-1997 (Biji Pinang Bukan untuk Obat)

No	Satker BPSIP	Lembaga Penerap		SNI yang diterapkan
6	Bangka Belitung	10	Bumdesma Mitra Lada Bersatu	SNI 0004:2013 (Lada Putih)
7	Sumatera Selatan	11	Kelompok Wanita Tani Beguyur	SNI 8964-2021 (Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk)
		12	CV Yohanes Mitra Kakao Mandiri	SNI 7934:2014 (Cokelat Dan Produk-Produk Cokelat)
		13	UMK Kopi Pondok Indah	SNI 01-3542-2004 (Kopi Bubuk)
		14	CV Kopi Anand	SNI 01-3542-2004 (Kopi Bubuk)
		15	PT Kulaku Indonesia	SNI 7381:2022 (Minyak Kelapa Virgin)
		16	CV Biji Kopi	SNI 01-3542-2004 (Kopi Bubuk)
		17	UMK Al Fath	SNI 3722:2018 (Minuman serbuk Berperisa)
8	Lampung	18	KWT Mawar	SNI 01-2907-2008 (Biji Kopi)
9	Bengkulu	19	Bukit Coffee	SNI 01-2907-2008 (Biji Kopi) SNI 8964-2021 (Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk)
10	Banten	20	CV. Mitra Mandala	SNI 3743:2021 (Gula Palma)
11	DKI Jakarta	21	Poktan Sejahtera Makmur	PTM (Kepmentan No 380 tahun 2023) Permentan No 53 2018 (PSAT) SNI Bina UMK (PP no 5 2021)
		22	Poktan New Garden Hydro	PSAT PDUK 3173405010031123
		23	Dodol Rogayah	SNI 2986:2013 (Dodol Beras Ketan)
		24	Leon Kitchen	SNI 01-2976-2006 (Saus Cabai)
		25	Stik kentang Uyunk	SNI 4031:2018 (Keripik Kentang)
12	Jawa Barat	26	Kelompok Sari Puspa	SNI 3211:2009 (Manggis)
13	Jawa Tengah	27	aNAKaKUB	SNI 8405-1:2017 (Bibit Ayam KUB)
		28	KWT Sri Lestari	SNI 3211-2009 (Manggis)
14	Yogyakarta	29	KT Tani Rukun	SNI 01-6999-2004 (Pembibitan Bawang Merah) Kepmentanno.261/KPTS/ SR.310/M/4/2019 (Pendampingan penerapan SOP Pupuk organik padat yang memenuhi standar mutu)
		30	KT Mekar	SNI 01-6999-2004 (Pembibitan Bawang)
		31	KWT Subur makmur	SNI 01-6999-2004 (Pembibitan Bawang)
15	Jawa Timur	32	Asosiasi Mangga Situbondo (AMS)	SNI 3164:2009 (Mangga) SNI 7387:2009 (Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan)
16	Bali	33	Unit pengolahan hasil belok bon kopi	SNI 01-2907-2008 (Biji Kopi)
17	NTB	34	Yayasan Ponpes Nurul Haramain	SNI 01-7156-2006 (Benih Panili)

No	Satker BPSIP	Lembaga Penerap		SNI yang diterapkan
18	NTT	35	Poktan Pemula	SNI 7651-4:2020 (Bibit Sapi Potong Bali)
		36	CV. Abon Jaya	SNI 3707:2021 (Abon Daging)
19	Kalimantan Barat	37	Poktan Harapan Baru	SNI 6729-2016 (Sistem Pertanian Organik)
20	Kalimantan Tengah	38	Gabungan Poktan di Desa Kahingai, Kec. Belantikan Raya	SNI 01-2907-2008 (Biji Kopi)
21	Kalimantan Selatan	39	Poktan Karya Baru	Kepmentan No. 42 Tahun 2019 (Perbenihan Cabai)
22	Kalimantan Timur	40	Gapoktan Berkah Bersatu	SNI 6729:2016 (Sistem Pertanian Organik)
23	Sulawesi Utara	41	Kelompok tani Berkat Taniku	SNI 4478: 2014 (Krisan Potong)
24	Gorontalo	42	Koperasi Sukma Melati Hutabohu (Korporasi Petani), Desa Hutabohu, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo	SNI 7763:2018 (Pupuk Organik Padat)
25	Sulawesi Tengah	43	IKM Suluh Gesang Desa Kospa Duata Karya Kec. Masama Kab. Banggai	SNI 7381:2022 (Minyak Kelapa Virgin)
26	Sulawesi Selatan	44	UMKM Kopi 1000 Nurhidayah	SNI 1003381112021 (Biji Roasted beans dan Kopi Bubuk Arabika)
27	Sulawesi Tenggara	45	PT. Kakao Kolut Madani	SNI 2323:2008/Amd1: 2010 (Biji Kakao)
		46	CV Afnan Syariah	2323:2008/Amd1: 2010 (Biji Kakao SNI)
28	Maluku	47	PT Kamboti Ewang Maluku	SNI 0006-2015 (Pala)
29	Papua	48	CV. Maju Tama Agro	SNI 6128:2020 (SNI Mutu Beras)
30	Maluku Utara	49	Poktan Mirimoi	SNI 6729:2016 (Sistem Pertanian Organik)
		50	Poktan Lestari	SNI 8969:2021 (IndoGAP)
31	Papua Barat	51	Koperasi Ebier Suth Cokran	SNI 01-2323-2008 (Biji Kakao) SNI 2323:2008/Amd1:2010 (Biji Kakao)
32	Sulawesi Barat	52	CV. Poki Cahaya Abadi	SNI 6729-2016 (Sistem Pertanian Organik)
33	Kepulauan Riau	53	Kelompok Tani Sumber Kelapa	SNI 01-7157-2006 (Benih kelapa dalam (Cocos nucifera L. var. Typica)

Berdasarkan Tabel 8, pada tahun 2023 telah dilakukan pendampingan terhadap 53 lembaga penerap. Lembaga penerap meliputi kelompok tani, koperasi, Industri Kecil Menengah, UMKM, Kelompok Wanita Tani, PT, CV, asosiasi pelaku usaha serta pondok pesantren. Berbagai komoditas pertanian yang menjadi fokus dalam penerapan standar yaitu sapi, ayam KUB, cabai, bawang merah, coklat, aren, jahe, kakao, kelapa, nanas, kopi, krisan, lada, manggis, padi, pala, pinang, pisang, pupuk organik, vanili, bayam merah, pakcoy, dan sayur segar lainnya.

Pendampingan lembaga penerap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar instrumen pertanian yang ditetapkan terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan produksi dan pengolahan komoditas pertanian. Dengan adanya penerapan standar yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pendampingan ke lembaga penerap dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: berkoordinasi dengan para *stakeholder*, mensosialisasikan kegiatan, menyelenggarakan workshop untuk penyusunan dokumen sertifikasi produk, memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen mutu, menyusun petunjuk teknis kegiatan (juknis), serta menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek).

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: 1) Keterbatasan pengetahuan sumber daya (tim dan pelaku penerap standar) mengenai pemahaman dan implementasi SNI; 2) Ketepatan waktu pelaku penerap standar dalam memenuhi kelengkapan dokumen mutu belum standar; 3) Biaya audit lapang yang cukup besar; 4) Belum ada lembaga sertifikasi produk (LSPro) di daerah setempat; dan 5) Minimnya ketersediaan modal usaha untuk menerapkan standar.

Tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan diatas dengan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dan melakukan pendampingan penerapan yang dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam implementasi SNI.

Output kegiatan pendampingan penerapan, diantaranya adalah: 1) Sertifikat tanda kesesuaian SNI; 2) Sertifikat Bina UMK; 3) SOP Pendukung dan Hasil Uji; 4) Sertifikat SPPT SNI; 5) Sertifikat SPP-IRT; 6) Sertifikat NIB; 7) Hasil Uji Lab Kontaminan Mikroba oleh BPOM; 8) Sertifikat Organik dari ICERT; dan 9) Hasil Uji Laboratorium Mutu Produk.

Sasaran ke dua yaitu meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar.

Sasaran 2

Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar

Indikator kinerja ke tiga adalah jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, yang dimaksud yaitu jumlah produk perbenihan yang telah disertifikasi. Indikator dimaksud merupakan kegiatan perbanyak benih. Capaian indikator tersebut sebesar 189.172,99 unit dari target 167.610,50 unit dengan nilai kinerja sebesar 112,86%, seperti dapat dilihat pada Tabel 9.

Indikator Kinerja 3 :

Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Produksi Instrumen Pertanian (unit)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	unit	167.610,5	189.172,99	112,86

Kegiatan perbanyak benih/bibit Tahun Anggaran 2023 lingkup BBPSIP terdiri dari 8 komoditas yang terbagi kedalam : subsektor tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk), perkebunan (kakao, kopi dan kelapa), dan peternakan (Ayam KUB dan domba). Total anggaran sebesar Rp. 6,6 milyar dengan target produksi benih/bibit, masing-masing: 190,5 ton (padi), 38 ton (jagung), 10.000 batang (jeruk), 7.000 pohon (kakao), 95.503 pohon (kopi), 10.500 pohon (kelapa), 10 ekor (domba), dan 44.369 ekor (ayam KUB). Secara rinci lokasi, alokasi anggaran dan target produksi serta realisasi masing-masing komoditas pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Perbanyak Benih Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih		
				Target	Sertifikat	Prosentase
1	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Papua, Maluku, Kepri, Sultra dan Malut (27 BPSIP)	Padi	Ton	190,5	175,95	92,36
2	Sumsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Maluku, Papua, Malut, Sulbar & Kepri (9 BPSIP)	Jagung	Ton	38	26,04	68,53
3	Riau	Jeruk	Batang	10.000	10.000	100
4	Papua Barat	Kakao	Pohon	7.000	7.000	100
5	Bali dan Kalimantan Barat	Kelapa	Pohon	10.500	11.111	105,82
6	Aceh, Babel, Lampung, Bali, Sulsel, Sulbar & Pabar (7 BPSIP)	Kopi	Pohon	95.503	98.819	103,47
7	Yogyakarta	Domba	Ekor	10	13	130
8	Sumut, Sumbar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, Kalsel, Sumsel & Sulteng (11 BPSIP)	Ayam KUB	Ekor	44.369	62.028	139,80

Realisasi perbanyak benih/bibit mencapai 189.172,99 unit atau sebesar 112,86% dari target capaian sebesar 167.610,50 unit. Perbanyak benih yang dapat mencapai target adalah jeruk, kakao, kopi dan kelapa serta perbanyak bibit domba dan ayam KUB. Sedangkan untuk perbanyak benih yang belum dapat mencapai target adalah komoditas padi dan jagung.

Perbanyak benih padi mencapai 175,95 ton dari target 190,5 ton dengan capaian 92,36%. Sebagian besar UPBS mencapai target sesuai rencana. Namun demikian, beberapa BPSIP tidak mencapai target yaitu Sumsel, NTT, Sulut, Sulteng, Papua dan Kepri serta Sultra. Secara rinci capaian perbanyak benih padi dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Perbanyak Benih Padi Tersertifikasi Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih Sertifikasi		
				Target	Realisasi	Prosentase
Sub Jumlah		Padi	Ton	190,5	175,95	92,36
1	Aceh	Padi	Ton	7	7	100
2	Sumatera Utara	Padi	Ton	6	6,91	115,1
3	Sumatera Barat	Padi	Ton	7	7,02	100,2
4	Riau	Padi	Ton	5	5	100
5	Jambi	Padi	Ton	7	7	100
6	Sumatera Selatan	Padi	Ton	12	9,7	80,8
7	Bengkulu	Padi	Ton	7	7	100
8	Banten	Padi	Ton	9	9,46	105,1
9	DKI Jakarta	Padi	Ton	4	4,5	112,5
10	Jawa Barat	Padi	Ton	8	8	100
11	Jawa Tengah	Padi	Ton	10	11,05	110,5
12	DI Yogyakarta	Padi	Ton	5	5	100
13	Jawa Timur	Padi	Ton	7	7,08	101,1
14	NTB	Padi	Ton	10	10	100
15	NTT	Padi	Ton	15	9,79	65,2
16	Kalimantan Barat	Padi	Ton	6,5	6,88	105,8
17	Kalimantan Tengah	Padi	Ton	9	9,47	105,2
18	Kalimantan Selatan	Padi	Ton	5,5	5,94	108
19	Kalimantan Timur	Padi	Ton	7	8,20	117,1
20	Sulawesi Utara	Padi	Ton	6	0	0
21	Gorontalo	Padi	Ton	5	6,12	122,4
22	Sulawesi Tengah	Padi	Ton	6,5	3,75	57,7
23	Papua	Padi	Ton	6	4,40	73,3
24	Maluku	Padi	Ton	6	7	116,7
25	Kepulauan Riau	Padi	Ton	3	2,5	83,3
26	Sulawesi Tenggara	Padi	Ton	6	0	0
27	Maluku Utara	Padi	Ton	5	7,2	144

Mitigasi permasalahan belum tercapainya target disebabkan karena beberapa hal yaitu : Campuran varietas lain (CVL) adalah suatu tanaman atau benih yang satu atau lebih karakteristiknya berbeda dari deskripsi varietas yang ditetapkan (Kepmentan No.991, 2018). CVL di perbanyak benih padi BPSIP Papua lebih dari 60% pada fase generatif (pemeriksaan lapang tahap 3) sehingga tidak dapat dijadikan benih. CVL dapat terjadi karena sumber telah tercampur, percampuran fisik benih atau bibit di persemaian. Pada saat tanam atau panen ketika perontokan gabah menggunakan alat yang habis dipakai untuk merontokan gabah lain, dan kontaminasi dari tanaman musim sebelumnya. Selain BPSIP Papua, calon benih padi BPSIP Sulteng mempunyai daya kecambah dibawah 80% sehingga oleh BPSB setempat dinyatakan tidak lolos uji. Kondisi yang terjadi di BPSIP Sultra yaitu terjadi kekeringan pada lahan sawah akibat adanya perbaikan saluran irigasi di wilayah Wawotobi dan akibat el nino mengakibatkan embung mengalami kekeringan. Sehingga kurangnya suplai air di lahan sawah mengakibatkan pertumbuhan padi tidak maksimal yang berdampak pada fase pengisian bulir padi menjadi kosong. Perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya peningkatan serangan OPT (tikus dan burung pipit). Calon Benih padi di BPSIP Kepri masih dalam proses sertifikasi oleh BPPSP TPHP Prov Kepri, sehingga dimungkinkan untuk realisasi produksi benih padinya bertambah. Kondisi benih padi di BPSIP Sulut panen tahap 1 rencana dilakukan bulan Februari 2024 dan proses sertifikasi pada bulan Maret 2024 dengan perkiraan produksi benih 1 ton. Sedangkan panen tahap 2 rencana dilakukan pada akhir Maret 2024 dan proses sertifikasi pada bulan April 2024 dengan perkiraan produksi benih 2 ton.

Secara umum capaian perbanyak benih jagung belum dapat mencapai target, sampai dengan bulan Desember baru dapat mencapai 68,5% dengan capaian 26 ton dari target 38 ton. UPBS yang dapat mencapai target yaitu BPSIP Kalimantan Timur, Maluku dan Sulawesi Barat. Sedangkan UPBS yang belum dapat mencapai target yaitu BPSIP Sumatera Selatan, Gorontalo, Papua, Kepri, dan Maluku Utara. Bahkan UPBS pada BPSIP Sulawesi Utara belum menghasilkan perbanyak benih. Secara rinci realisasi perbanyak benih jagung disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Perbanyak Benih Jagung Tersertifikasi Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih Sertifikasi		
				Target	Realisasi	Prosentase
Sub Jumlah		Jagung	Ton	38	26,04	68,5
1	Sumatera Selatan	Jagung	Ton	4	2,24	56
2	Kalimantan Timur	Jagung	Ton	3	3	100
3	Sulawesi Utara	Jagung Hibrida	Ton	4	0	0
4	Gorontalo	Jagung	Ton	4	1,7	42,5
5	Papua	Jagung	Ton	4	3,5	87,5
6	Maluku	Jagung	Ton	6	6	100
7	Kepulauan Riau	Jagung	Ton	3	1,1	36,7
8	Sulawesi Barat	Jagung	ton	5	5	100
9	Maluku Utara	Jagung	ton	5	3,5	70

Mitigasi permasalahan tidak tercapainya target produksi benih jagung disebabkan beberapa hal, yaitu; 1) Terjadinya musim kemarau yang lebih panjang (el nino) di Gorontalo dan Maluku Utara sehingga menyebabkan tanaman tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, 2) Perbanyak benih jagung di Papua pada fase awal pertumbuhan mengalami gangguan akibat terdampak banjir, 3) BPSIP Kepri masih proses sertifikasi oleh BPPSP TPHP Prov Kepri, sehingga diharapkan terjadi penambahan realisasi perbanyak benih dan 4) BSIP Sulut penanaman baru dilaksanakan bulan November, saat ini masih dalam tahap pertumbuhan malai, rencana dilakukan panen pada minggu kedua bulan Maret 2024 dan proses sertifikasi pada bulan Mei 2024 dengan perkiraan produksi benih 1,5 ton.

Jeruk merupakan satu-satunya komoditas dari sub sektor hortikultura yang dapat mencapai perbanyak benih 100% dari target 10.000 batang dan sertifikasi 10.000 batang, dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Perbanyak Benih Jeruk Tersertifikasi Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih Sertifikasi		
				Target	Realisasi	Prosentase
1	Riau	Jeruk	Batang	10.000	10.000	100

Komoditas yang diperbanyak dari sub sektor perkebunan adalah kakao, kopi dan kelapa. Kopi menjadi komoditas yang paling banyak dikembangkan di 8 BPSIP yaitu Aceh, Bangka Belitung, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sedangkan kelapa di BPSIP Bali dan Kalimantan Barat serta kakao di BPSIP Papua Barat. Secara umum realisasi perbanyak benih di sektor perkebunan dapat tercapai bahkan melebihi target, terutama kelapa dan kopi. Benih kelapa diproduksi sebanyak 11.111 pohon dari target 10.500

pohon (105,8%). Sedangkan benih kopi dihasilkan sebanyak 98.819 pohon dari target 95.503 pohon (103,5%). Realisasi kegiatan perbanyak benih kakao, kopi, dan kelapa dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Perbanyak Benih Kakao, Kelapa dan Kopi Tersertifikasi Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih		
				Target	Sertifikat	Prosentase
BBPSIP		Kakao	Pohon	7.000	7.000	100,0
1	Papua Barat	Kakao	Pohon	7.000	7.000	100,0
BBPSIP		Kelapa	Pohon	10.500	11.111	105,8
1	Bali	Kelapa	Pohon	6.000	6.608	110,1
2	Kalimantan Barat	Kelapa	Pohon	4.500	4.503	100,1
BBPSIP		Kopi	Pohon	95.503	98.819	103,5
1	Aceh	Kopi	Pohon	14.000	14.000	100,0
2	Bangka Belitung	Kopi	Pohon	20.000	20.000	100,0
3	Lampung	Kopi	Pohon	13.501	15.450	114,4
4	Bali	Kopi	Pohon	11.001	11.264	102,4
5	Papua Barat	Kopi	Pohon	7.000	8.000	114,3
6	Sulawesi Barat	Kopi	pohon	8.000	8.000	100,0
7	Sulawesi Tenggara	Kopi	Pohon	10.000	10.067	100,7
8	Sulawesi Selatan	Kopi	Pohon	12.001	12.038	100,3

Perbanyak bibit sub sektor peternakan yaitu : domba dan ayam KUB. Seluruh komoditas dapat mencapai target produksi bibit bahkan melebihi target sebesar 139,8% atau sebanyak 62.028 ekor. Perbanyak bibit ayam KUB yang dicapai oleh BPSIP Yogyakarta jauh di atas target yaitu sebanyak 9.406 ekor dari target 4.025 ekor atau tercapai 233,69%. Capaian yang sangat tinggi tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya daya tetas yang tinggi dan produksi telur yang banyak. Namun berbeda dengan di BPSIP Sulawesi Tengah produksi bibit ayam KUB tidak dapat mencapai target, yaitu hanya dapat memproduksi sebanyak 7,5%, disebabkan karena daya tetas rendah sehingga produksi telur yang dihasilkan belum memenuhi syarat untuk ditetaskan. Sedangkan untuk domba, bibit yang dihasilkan sebanyak 13 ekor dari target 10 ekor atau tercapai 130%. Secara rinci capaian perbanyak bibit domba dan ayam KUB dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Perkembangan Perbanyak Bibit Domba dan Ayam KUB Tersertifikasi Tahun 2023

No	BPSIP	Komoditas	Satuan	Benih		
				Target	Sertifikat	Prosentase
	BBPSIP	Domba	Ekor	10	13	130
1	DI Yogyakarta	Domba	Ekor	10	13	130
	BBPSIP	Ayam KUB	Ekor	44.369	62.028	139,8
1	Sumatera Utara	Ayam KUB	Ekor	10.344	14.350	138,7
2	Sumatera Barat	Ayam KUB	Ekor	4.000	5.169	129,2
3	Banten	Ayam KUB	Ekor	5.000	5.085	101,7
4	Jawa Tengah	Ayam KUB	Ekor	7.900	9.480	120,0
5	DI Yogyakarta	Ayam KUB	Ekor	4.025	9.406	233,7
6	Jawa Timur	Ayam KUB	Ekor	600	600	100,0
7	NTB	Ayam KUB	Ekor	6.000	11.671	194,5
8	NTT	Ayam KUB	Ekor	1.000	1.019	101,9
9	Kalimantan Selatan	Ayam KUB	Ekor	2.500	3.073	122,9
10	Sulawesi Tengah	Ayam KUB	Ekor	1.000	75	7,5
11	Sulawesi Selatan	Ayam KUB	Ekor	2.000	2.100	105,0

Sasaran ke tiga adalah terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Sasaran 3

Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran di atas diimplementasikan ke dalam indikator kinerja nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Indikator Kinerja 4:

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)

Pembangunan ZI dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pembangunan ZI harus dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah, sehingga

pada periode Renstra 2023 – 2024, di seluruh satker Lingkup BSIP, mempunyai Indikator Kinerja Utama “Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM”, yang harus dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Pentingnya Zona Integritas berdasarkan Permenpan RB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) internal Kementan maupun nasional, maka diperlukan evaluasi. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) oleh tim assessor yang merupakan Tim Penilai Internal BSIP yang telah disahkan oleh pimpinan instansi (Kepala BSIP). Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Internal (TPI) Kementan untuk dilakukan *Quality Assurance*.

Penilaian indikator kinerja Zona Integritas BBPSIP dilakukan oleh Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (PSIH) sebagai tim *assessor* dengan nilai sebesar 85,35. Nilai capaian kinerja indikator nilai pembangunan zona integritas dapat dilihat pada Tabel 16, rincian hasil penilaian masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 17. Hasil penilaian ZI telah disahkan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor:2026/kpts/PW.410/H/12/2023 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	81	85,35	105,37

Tabel 17. Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian oleh Tim Assessor

No	Komponen	Nilai
A.	PENGUNGKIT	52,68
I.	PEMENUHAN	25,76
1.	Manajemen Perubahan	2,92
2.	Penataan Tata Laksana	2,93
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,11
4.	Penguatan Akuntabilitas	4,69
5.	Penguatan Pengawasan	6,36
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,75
II.	REFORM	26,92
1.	Manajemen Perubahan	3,58
2.	Penataan Tata Laksana	2,67
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,67
4.	Penguatan Akuntabilitas	4,50
5.	Penguatan Pengawasan	7,50
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00
B.	HASIL	32,67
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	16,88
II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	15,79
	NILAI TOTAL	85,35

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas memiliki indikator kinerja nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan capaian keluaran (*output*). Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1) Capaian keluaran (rincian *output*), b) Penyerapan anggaran, c) Efisiensi, dan d) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai kinerja anggaran BBPSIP sebesar 92,57 dari target 91,5 (101,17%) yang diperoleh melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dapat dilihat pada Tabel 18.

Indikator Kinerja 4:

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	91,5	92,57	101,17

Nilai Kinerja Anggaran BBPSIP hingga tanggal 31 Desember 2023 mencapai 101,17% dari target 91,5 diperoleh capaian kinerja 92,57, dengan rincian sebagai berikut: 1) Capaian rincian *output* sebesar 100%; 2) Penyerapan anggaran sebesar 95,53%; 3) Nilai efisiensi sebesar 85,41% dan 4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Konsistensi RPD Akhir) sebesar 84,51%.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker BBPSIP dihitung berdasarkan hasil penjumlahan Indikator Capaian Rincian *Output* (bobot 43,5%), Nilai Efisiensi (bobot 28,6%), Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (bobot 18,2%) dan Penyerapan Anggaran (bobot 9,7%). Secara rinci perhitungan Nilai Kinerja Anggaran dapat dilihat pada Tabel 19. Sedangkan capaian kinerja berdasarkan nilai SMART dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 19. Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Penerapan Tahun 2023

	Bobot NKA	Capaian	NKA
Penyerapan	0,097	95,53	9,27
Konsistensi	0,182	84,51	15,38
CRO	0,435	100	43,50
Nilai Efisiensi	0,286	85,41	24,43
			92,57



Gambar 2. Nilai SMART Balai Besar Penerapan Tahun 2023 pada Aplikasi SMART

Keterangan :

$$\begin{aligned}
 \text{NKA} &= (9,7\% \times \text{penyerapan anggaran}) + (18,2\% \times \text{konsistensi}) + (43,5\% \times \\
 &\quad \text{Capaian Rincian Output}) + (28,6\% \times \text{nilai efisiensi}) \\
 &= (9,7\% \times 84,51) + (18,2\% \times 84,51) + (43,5\% \times 100) + (28,6\% \times \\
 &\quad 85,41) \\
 &= 9,27 + 15,38 + 43,5 + 24,43 \\
 &= 92,57
 \end{aligned}$$

Nilai kinerja anggaran satker BBPSIP masuk predikat sangat baik karena memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran reformasi birokrasi.

3.1.2. Perbandingan Kinerja Antar Tahun

Pengukuran perbandingan capaian indikator kinerja kurun waktu 2019-2023 didasarkan pada indikator kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja selama 5 tahun. Indikator yang dijadikan perbandingan hanya dua indikator yaitu Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Hal ini disebabkan karena hanya dua indikator tersebut yang tetap digunakan setelah berubahnya organisasi dari Balitbangtan menjadi BSIP sehingga terjadi perubahan Renstra. Secara rinci perbandingan capaian indikator kinerja selama tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 20.

Indikator nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian tahun 2021 mencapai kinerja sebesar 109,87% meningkat bila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai kinerja sebesar 106,61%. Capaian nilai ZI tahun 2022 sebesar 109,35% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 109,87%. Namun demikian nilai capaian ZI pada tahun 2022 sebesar 87,48 meningkat bila dibandingkan nilai ZI tahun 2021 sebesar 86,80. Sedangkan untuk capaian nilai Pembangunan ZI BBPSIP Tahun 2023 sebesar 85,35 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan baru terbentuknya sebagai organisasi baru, sehingga data dukung yang masih terbatas pada kurun waktu setahun. Namun demikian capaian kinerja indikator tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 81 dengan nilai capaian 105,37.

Indikator nilai kinerja anggaran BB Pengkajian selama Tahun 2020 sampai dengan 2022, menunjukkan hasil capaian yang fluktuatif, berdasarkan nilai SMART berturut – turut dari tahun 2020 sampai 2022 sebesar 85,82%; 95,51%; 90,5% dan 95,12%. Untuk hasil capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2019 sebesar 96,90, walaupun untuk NKA tahun 2019 tidak mempunyai target pada Perjanjian Kinerja. Sedangkan untuk capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPSIP Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 92,57.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		%		Tahun 2020		%		Tahun 2021		%		Tahun 2022		%		Tahun 2023		%		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan dan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)			79	84,22	106,61				79	86,80	109,87			80	87,48	109,35			81	85,35	105,37
Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian		96,90	90	95,51	106,12			90,5	90,5	100			91	95,12	104,53			91,5	92,57	101,17	

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Target Renstra Tahun 2023 – 2024

Pengukuran capaian Renstra Tahun 2023-2024 dilihat dengan cara membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2024. Indikator yang dijadikan perbandingan yaitu indikator yang terdapat pada Renstra Tahun 2023-2024. Perbandingan capaian tahun 2023 dengan jumlah target 2023 dan 2024 dihitung untuk indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dan jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan. Capaian perbandingan ketiga indikator dimaksud belum mencapai 100 % karena baru di tahun pertama. Namun demikian untuk indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian sudah lebih dari 50% disebabkan karena capaian kedua indikator dimaksud pada tahun berjalan mencapai lebih dari 100%. Namun demikian, walaupun capaian kinerja jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan pada tahun berjalan dapat mencapai lebih dari 100%, tetapi perbandingan kinerja kedua tahun tersebut masih belum dapat mencapai lebih dari 50%, hal ini disebabkan karena target pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023.

Sedangkan untuk indikator nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan dan Standar Instrumen Pertanian dan nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian hanya bisa dibandingkan capaian tahun berjalan dengan target tahun 2024, bukan merupakan penjumlahan target. Capaian perbandingan kedua indikator dimaksud telah dapat mencapai target. Secara rinci pengukuran nilai capaian dibandingkan dengan target Renstra 2023 -2024 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Kinerja BBPSIP Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2023 - 2024		Jumlah Target 2022-2024	Realisasi Tahun 2023	Jumlah Capaian Dibandingkan Target Tahun 2024
		2023	2024			
1	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	34	34	68	55	80,88
2	Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	34	34	68	53	77,94
3	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan	167.607,5	298.927	466.534,5	189.172,99	40,54
4	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan dan Standar Instrumen Pertanian	81	82	163	85,35	104,08
5	Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	91,5	91,5	184	92,57	101,17

3.1.4. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BBPSIP dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2023 didukung oleh: 1) Kecepatan, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan tersedia tepat waktu; 2) Penanggung jawab dan anggota pelaksana kegiatan secara reguler dan intensif bertemu untuk mengevaluasi capaian dan kendala teknis untuk diantisipasi di tiap BPSIP; 3) Sistem monitoring yang dilaksanakan secara berkala dan intensif oleh BBPSIP untuk menjamin capaian *output* sesuai target dan terkendalinya hambatan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target; 4) *Input* substansi teknis dari narasumber yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan pada waktu pengawalan atau pendampingan; 5) Kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (tenaga fungsional dan tenaga administrasi) dan 6) Sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Capaian kinerja kegiatan tahun 2023 terkendala dengan adanya pemblokiran anggaran di awal tahun. Kegiatan baru dapat dilaksanakan mulai bulan Mei 2023. Kendala lainnya berupa kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala dimaksud antara lain: 1) Sebagian kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian membutuhkan koordinasi dengan dinas dan *stakeholder* terkait terutama dalam penentuan lokasi dan calon petani koperator, sehingga perlu penyesuaian waktu pelaksanaan; 2) Minimnya pemahaman terkait penerapan standar instrumen pertanian; 3) Terbatasnya SDM dan kurang optimalnya dalam pengelolaan keuangan; dan 4) Sebagian kegiatan di lapangan sangat dipengaruhi oleh dinamika cuaca sehingga diperlukan penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan kegiatan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi untuk memperbaiki kinerja kegiatan adalah: 1) Memperbanyak pelatihan dan sertifikasi petugas yang menangani kegiatan dan secara bertahap dapat mengatasi permasalahan SDM yang masih belum memadai; 2) Memberikan pemahaman terkait proses standar dan penerapan standar; 3) Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* untuk menjamin keberlanjutan kegiatan jika terjadi *refocusing*; dan 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi, arahan dan rekomendasi lokasi yang ideal untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya target kegiatan.

3.1.5. Capaian Kinerja BBPSIP Lainnya

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan meningkatkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun global. Kehadiran dan keberadaan BSIP diharapkan berkontribusi pada pembangunan pertanian melalui produk dan sistem pertanian terstandar. Sesuai arahan Menteri Pertanian bahwa BSIP agar menyiapkan benih dan bibit terstandar dan tersertifikasi sehingga dapat mengoptimalkan produksi. Upaya dalam menjalankan strategi tersebut adalah meningkatkan penyediaan benih unggul dan tersertifikasi. Untuk itu, tata kelola penyediaan benih unggul berkualitas menjadi hal yang penting untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Benih/bibit bukan sekadar bahan tanam/hewan, melainkan sarana pembawa teknologi yang mengandung potensi genetik untuk meningkatkan produksi tanaman/ternak.

Kinerja BBPSIP lainnya dalam mencapai Visi dan Misi BSIP serta pelaksanaan *quick win* yang ditargetkan dapat diselesaikan akhir tahun 2023. *Quick win* dimaksud yang termasuk dalam ranah BBPSIP, yaitu tata kelola Unit Pengelola Benih ter-Standar (UPBS), pendampingan penerapan SNI DOC ayam KUB di Jawa Tengah dan pendampingan penerapan pasca panen bunga krisan di Sulawesi Utara.

Tata Kelola UPBS

UPBS merupakan salah satu unit perbenihan di BPSIP seluruh Indonesia, dikoordinasikan oleh BBPSIP. UPBS BPSIP sangat berperan penting dalam proses persiapan, produksi, hingga pendistribusian benih/bibit, didukung sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga terampil dalam memenuhi kebutuhan benih/bibit di daerah dan *stakeholder* mendukung program nasional. Hal ini dilakukan agar ketersediaan benih/bibit dapat memenuhi prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga), maka disusun Pedoman Umum Tata Kelola UPBS lingkup BBPSI.

Maksud penyusunan pedoman umum tata Kelola UPBS adalah untuk menyediakan panduan tata kelola UPBS tanaman/ternak lingkup BBPSIP. Tujuan pedoman tata kelola UPBS adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh UPBS lingkup BBPSIP dalam pengelolaan benih/bibit yang terstandar. Sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya UPBS sesuai standar dan memiliki kapasitas jaminan mutu. Ruang lingkup pedoman umum tata kelola UPBS meliputi kegiatan UPBS di seluruh BPSIP se-Indonesia, yaitu:

1. Komponen lembaga/organisasi tata kelola UPBS terdiri dari : 1) Sumber Daya Manusia, 2) Sarana dan prasarana (sarpras), 3) Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan dan d) Kerja sama.
2. Sistem pengelolaan benih/bibit terstandar suatu rangkaian proses pengelolaan benih terstandar benih/bibit ternak, terdiri dari: 1) Produksi perbanyak benih/bibit; 2) Panen; 3) Pasca panen, proses pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan untuk benih/bibit; dan 4) Distribusi.
3. Sistem Manajemen Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) tata kelola UPBS tanaman dan ternak mengikuti pedoman SNI 9001:2015 tentang persyaratan sistem manajemen mutu, meliputi: 1) Pengendalian mutu benih terstandar, terdiri dari : monitoring, evaluasi, koreksi, dan tindakan korektif dan 2) Sertifikasi produk.
4. Sistem informasi merupakan sebuah sistem formal dan terorganisir yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi.

Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditi Krisan di Sulawesi Utara.

Kota Tomohon di Sulawesi Utara dikenal sebagai kota bunga yang memiliki potensi sebagai sentra florikultura di kawasan timur Indonesia terutama bunga krisan mempunyai banyak keragaman, baik dari segi penampilan, warna dan bentuk bunga. Potensi besar ini ditandai dengan budaya menanam bunga sejak zaman dahulu, dibuktikan dengan jumlah kelompok tani bunga sekitar 42 kelompok, 38 kios-kios tanaman hias/floris di Kota Tomohon. Produksi krisan tahun 2020 mencapai 5 juta tangkai dengan luas panen hampir mencapai 5 juta tangkai, dan harga jual Rp3.500,00 per tangkai bunga.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah membangun kawasan agribisnis bunga krisan yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian berbasis *Good Agriculture Practice* (GAP) dan *Good Handling Practice* (GHP) dan melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian komoditi krisan berbasis GAP dan GHP. Lokasi kegiatan pendampingan ini di kawasan agribisnis pertanian komoditi krisan Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon pada kelompok tani krisan BSIP Sulawesi Utara. Melalui koordinasi dan sinergi dengan *stakeholder*, seperti : Dinas Pertanian dan Perikanan kota Tomohon, BPP Kecamatan Tomohon Utara, BPSB Kota Tomohon, petani/kelompok tani yang berada di Kecamatan Tomohon Utara, serta Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado dan instansi terkait lainnya.

Hasil pendampingan *quick win* pasca panen bunga krisan di BSIP Sulawesi Utara, telah menunjukkan petani sudah menerapkan standar yang sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) instrumen

pertanian. Data yang diambil menunjukkan dari hasil rata – rata pengukuran SNI Krisan Potong Nomor 4478 tahun 2014 terlihat kelas mutu sudah berada pada grade AA. Keuntungan rata-rata adalah sebesar Rp3.954.000,00 dalam satu kali musim tanam untuk luasan lahan green house berukuran 18 x 8 m.

Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ayam KUB di Jawa Tengah.

Pemasyarakatan hasil inovasi ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat, dilihat dari Pemesanan *Day Old Chick* (DOC) ayam KUB pada UPBS ayam KUB hingga akhir tahun 2023. Peningkatan populasi ayam KUB perlu dukungan dan peran kelompok peternak ayam KUB yang secara teknis sesuai dengan standar instrumen Bibit DOC ayam KUB/ SNI 8405-1:2017. Pendampingan penerapan standar instrumen ayam KUB dilaksanakan pada Perkumpulan peternak ayam KUB (aNAK aKUB) Jawa Tengah. Perkumpulan peternak aNAK aKUB Jawa Tengah beralamat di Jl. Pos Tingkir-Suruh Km 1, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Salatiga.

Tujuan kegiatan pendampingan penerapan dan diseminasi SNI ayam KUB (SNI 8405-1:2017) adalah: 1) Melakukan pendampingan dalam memproduksi DOC sesuai SNI 8405-1:2017 di aNAK aKUB Jawa Tengah; 2) Melakukan pendampingan dalam memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan 3) Mendiseminasikan SNI 8405-1:2017.

Hasil pendampingan menunjukkan : 1) Produksi DOC ayam KUB aNAK aKUB memenuhi kriteria SNI 8405-1:2017; 2) Proses produksi bibit ternak dan perkumpulan peternak aNAK aKUB Jawa Tengah telah memenuhi kesesuaian Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP-BBT) dan Bibit ternak (DOC) yang dihasilkan memenuhi kriteria SNI 8405-1:2017 Ayam KUB 1 dan direkomendasikan untuk penerbitan sertifikat kesesuaian SNI; dan 3) Diseminasi SNI 8405-1:2017 dilakukan melalui platform media sosial, media tercetak, pameran, bimtek dan media massa.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Capaian kinerja keuangan BBPSIP berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Hasil efisiensi dan nilai efisiensi dapat diukur dari perhitungan anggaran, realisasi, dan volume terhadap kelima indikator kinerja tahun berjalan, yaitu: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan; 2) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 3) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 4) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian; dan 5) Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Berdasarkan perhitungan

tersebut, pagu anggaran efisiensi sebesar Rp 353,77 milyar dengan realisasi sebesar Rp 339,97 milyar (96,1%).

Kinerja capaian fisik indikator kinerja BBPSIP secara umum dapat mencapai target, bahkan ada beberapa yang melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk indikator jumlah produk instrumen pertanian terstandar khususnya untuk produk instrumen tanaman pangan tidak dapat mencapai target. Hal disebabkan karena adanya el nino pada beberapa daerah, sehingga tidak dapat memproduksi benih padi dan jagung. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi tersebut, kisaran efisiensi untuk masing-masing indikator berkisar antara -6,45 sampai 59,25. Secara rinci capaian efisiensi masing-masing indikator kinerja adalah; 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebesar 59,25, (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian sebesar 47,69, 3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan sebesar -6,45, 4) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian sebesar 1,02, dan 5) Indikator nilai kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian 0,06.

Jika dibandingkan antara sumber anggaran yang dialokasikan dengan hasil (*output*) kinerja yang dicapai, maka BBPSIP dapat dikategorikan berhasil dalam menjalankan efisiensi dalam mencapai kinerjanya. Hal ini didasari dari pengertian mengenai efisiensi, yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Atau dengan kata lain, efisiensi dapat diterjemahkan sebagai perbandingan *output* terhadap *input*. Berdasarkan rumus perhitungan efisiensi, BBPSIP telah melakukan efisiensi setara dengan 20% atau nilai efisiensi sebesar 100%.

Secara rinci nilai efisiensi indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian 2023

No	Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian ((7)-(6)/(5)*100)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Capaian x Alokasi (10)=(7)x(8)	(Capaian x Alokasi) - Realisasi (11)=(10)-(9)	Efisiensi (12)=-((11)/(9))*100	Nilai Efisiensi (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan						39.107.159.000	28.257.640.209	72,3	51.428.937.925	23.171.297.716	59,25	148,63
		Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Standar	34	50	147	3.531.080.000	3.514.613.577	99,5	5.192.764.706	1.678.151.129		
		Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	Orang	18.540	24.067	130	31.792.918.000	20.968.971.984	66	41.270.774.407	20.301.802.423		
		Sarana Laboratorium Standardisasi	Unit	16	21	131	3.783.161.000	3.774.054.648	99,8	4.965.398.813	1.191.344.165		
2	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian						20.000.119.000	19.887.701.818	99,4	29.426.656.088	9.538.954.270	47,69	119,74
		Lembaga Penerap Standar yang didampingi	Lembaga	34	53	156	4.700.119.000	4.662.496.366	99,2	7.326.656.088	2.664.159.722		
		Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (ICARE)	Lembaga	9	13	144	15.300.000.000	15.225.205.452	99,5	22.100.000.000	6.874.794.548		
3	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Testandar yang Dihasilkan						32.474.589.000	32.168.543.752	99,1	30.074.167.269	(2.094.376.483)	-6,45	33,88
		Produk Instrumen Tanaman Pangan Testandar	Unit	228.50	201,99	88,40	28.724.838.000	28.506.664.333	99,2	25.392.253.950	(3.114.410.383)		
		Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Testandar	Unit	113.003	116.930	103,48	1.377.834.000	1.370.475.979	99,5	1.425.715.509	55.239.530		

No	Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian (7) = (6) / (5) * 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Capaian x Alokasi (10) = (7) x (8)	(Capaian x Alokasi) - Realisasi (11) = (10) - (9)	Efisiensi (12) = (11) / (8) * 100	Nilai Efisiensi (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar	Unit	10.000	10.000	100	150.000.000	1.49.617.225	99,7	150.000.000	382.775		
		Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar	Unit	44.379	62.041	139,80	2.221.917.000	2.141.786.215	96,4	3.106.197.810	964.411.595		
4	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian					232.610.902.000	230.240.373.970	99,0	3.125.434.000	2.370.528.030	1,02	52,55	
		Layanan BWN	Layanan	31	31	100	2.675.434.000	2.625.037.733	98,1	2.675.434.000	50.396.267		
		Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100	300.000.000	299.888.504	100	300.000.000	111.496		
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100	150.000.000	146.924.000	97,9	150.000.000	3.076.000		
		Layanan Umum	Layanan	33	33	100	7.591.018.000	7.510.020.905	98,9	7.591.018.000	80.997.095		
		Layanan Perkantoran	Layanan	36	36	100	1.48.556.243.000	146.498.151.570	98,6	148.556.243.000	2.058.091.430		
		Layanan Perkantoran	Layanan	34	34	100	71.009.818.000	70.873.899.857	99,8	71.009.818.000	135.918.143		
		Layanan Manajemen SDM	Layanan	1884	1884	100	2.328.389.000	2.286.451.401	98,2	2.328.389.000	41.937.599		

No	Indikator Kinerja	RO Pendukung	Subuan	Target	Realisasi	% Capaian (7)=(6)/ (5)*100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Capaian x Alokasi (10)=(7)x(8)	(Capaian x Alokasi) - Realisasi (11)=(10)-(9)	Efisiensi (12)=(11)/ (9)*100	Nilai Efisiensi (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian						29.578.349.000	29.420.324.712	99,5	25.917.362.250	1.735.092.538	0,06	50,15
		Layanan Sarana Internal	Unit	11	11	100	140.007.000	140.000.000	100	140.007.000	7.000		
		Layanan Prasarana Internal	Unit	8	9	113	12.616.546.000	12.606.101.058	99,9	14.193.614.250	1.587.513.192		
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	35	35	100	11.583.741.000	11.491.381.092	99,2	11.583.741.000	92.359.908		
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	34	34	100	2.259.251.000	2.240.619.896	99,2	2.259.251.000	18.631.104		
		Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	34	34	100	2.978.804.000	2.942.222.666	98,8	2.978.804.000	36.581.334		
	TOTAL				353.771.118.000	339.974.584.461	96,1			≈ 20	≈ 100		

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023 lingkup BBPSIP sebesar Rp264.157.413.000,00. Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran lingkup BBPSIP sampai akhir bulan Desember 2023 menjadi sebesar Rp353.771.118.000,00. Realisasi anggaran Lingkup BBPSIP per 31 Desember 2023 berdasarkan data SPAN adalah sebesar Rp339.974.584.461,00 (96,1%), sedangkan sisa anggaran adalah sebesar Rp13.796.533.539,00 (4,06%). Secara rinci realisasi per *output* dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen Rincian *Output* (KRO) Kegiatan Lingkup BBPSIP Tahun 2023 (data SPM)

Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target	Satuan	Pagu	Realisasi	%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			59.107.278.000	48.145.342.027	81,45
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			59.107.278.000	48.145.342.027	81,45
6916.ADA	Standarisasi Produk			3.531.080.000	3.514.613.577	99,53
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	52	Standar	3.531.080.000	3.514.613.577	99,53
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			31.792.918.000	20.968.971.984	65,95
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	18.540	orang	31.792.918.000	20.968.971.984	65,95
6916.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			4.700.119.000	4.662.496.366	99,20
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	34	Lembaga	4.700.119.000	4.662.496.366	99,20
6916.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			3.783.161.000	3.774.054.648	99,76
6916.CAG.109	Sarana Laboratorium Standardisasi	16	Unit	3.783.161.000	3.774.054.648	99,76
6916.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			15.300.000.000	15.225.205.452	99,51
6916.QDB.101	<i>Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (ICARE)</i>	9	Lembaga	15.300.000.000	15.225.205.452	99,51
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			32.474.589.000	32.168.543.752	99,06
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar			32.474.589.000	32.168.543.752	99,06
6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			32.474.589.000	32.168.543.752	99,06

Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target	Satuan	Pagu	Realisasi	%
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	231.5	Unit	28.724.838.000	28.506.664.333	99,24
6915.CAG.102	Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar	113.000	Unit	1.377.834.000	1.370.475.979	99,47
6915.CAG.103	Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar	10.000	Unit	150.000.000	149.617.225	99,74
6915.CAG.104	Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar	44.379	Unit	2.221.917.000	2.141.786.215	96,39
WA	Program Dukungan Manajemen			262.189.251.000	259.660.698.682	99,04
1809	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian			71.009.818.000	70.873.899.857	99,81
1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			71.009.818.000	70.873.899.857	99,81
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	34	Layanan	71.009.818.000	70.873.899.857	99,81
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian			191.179.433.000	188.786.798.825	98,75
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			159.272.695.000	157.080.022.712	98,62
6918.EBA.956	Layanan BMN	31	Layanan	2.675.434.000	2.625.037.733	98,12
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	300.000.000	299.888.504	99,96
6918.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	150.000.000	146.924.000	97,95
6918.EBA.962	Layanan Umum	33	Layanan	7.591.018.000	7.510.020.905	98,93
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	36	Layanan	148.556.243.000	146.498.151.570	98,61
6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			12.756.553.000	12.746.101.058	99,92
6918.EBB.951	Layanan Sarana Internal	11	Unit	140.007.000	140.000.000	100,00
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	8	Unit	12.616.546.000	12.606.101.058	99,92
6918.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			2.328.389.000	2.286.451.401	98,20
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.884	Orang	2.328.389.000	2.286.451.401	98,20
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			16.821.796.000	16.674.223.654	99,12
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	35	Layanan	11.583.741.000	11.491.381.092	99,20
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	34	Layanan	2.259.251.000	2.240.619.896	99,18
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	34	Layanan	2.978.804.000	2.942.222.666	98,77
TOTAL				353.771.118.000	339.974.584.461	96,10

Sumber data : Aplikasi E-Monev BSIP 2023

Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 24. sedangkan realisasi per belanja setiap BPSIP dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Lingkup BBPSIP 31 Desember 2023

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	%
1	Pegawai	137.670.161.000	136.354.954.403	99,04	1.315.206.597	0,96
2.	Barang	199.561.243.000	187.099.474.352	93,75	12.461.768.648	6,24
3.	Modal	16.539.714.000	16.520.155.706	99,88	19.558.294	0,12
Total		353.771.118.000	339.974.584.461	96,10	13.796.533.539	4,06

Sumber data: Aplikasi OMSPAN 15 Januari 2023

Realisasi anggaran lingkup BBPSIP sebesar 96,10% terdiri dari belanja pegawai sebesar 99,04%, belanja barang sebesar 93,75% dan belanja modal sebesar 99,88%.

Tabel 25. Realisasi Anggaran per BPSIP Tahun 2023

No	Kode/ Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total		
		Pagu (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	%	Pagu (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	%	Pagu (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	%	Pagu (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	%
1	BPSIP Sulut	3.798	3.787	99,71	5.000	4.975	99,51	100	100	100	8.898	8.862	99,60
2	BPSIP DIY	4.932	4.894	99,23	4.573	4.569	99,93	50	50	50	9.554	9.513	99,57
3	BPSIP Kalbar	3.847	3.839	99,81	6.634	6.398	96,45	198	198	100	10.679	10.436	97,73
4	BPSIP NTT	6.726	6.711	99,78	5.466	5.186	94,89	-	-	-	12.192	11.898	97,58
5	BPSIP Sulsel	6.933	6.878	99,21	12.699	12.258	96,53	-	-	-	19.632	19.136	97,47
6	BPSIP Lampung	4.033	3.961	98,23	9.231	8.964	97,11	-	-	-	13.264	12.925	97,45
7	BPSIP Jabar	5.551	5.550	99,99	10.117	9.682	95,70	773	773	100	16.441	16.005	97,35
8	BPSIP Sultra	3.591	3.554	98,98	6.630	6.395	96,47	-	-	-	10.221	9.950	97,35
9	BPSIP Sumbang	5.078	4.991	98,29	6.558	6.331	96,54	-	-	-	11.637	11.323	97,30
10	BPSIP Bengkulu	4.388	4.377	99,75	3.839	3.622	94,35	145	145	100	8.373	8.145	97,28
11	BPSIP NTB	5.758	5.726	99,45	6.079	5.771	94,92	840	837	99,6	12.677	12.334	97,29
12	BPSIP Bali	5.796	5.779	99,72	3.967	3.708	93,48	-	-	-	9.763	9.488	97,18
13	BPSIP Riau	4.120	4.112	99,79	3.456	3.233	93,56	80	80	100	7.656	7.425	96,98
14	BPSIP Kalteng	2.460	2.450	99,61	4.916	4.698	95,57	464	459	98,96	7.840	7.608	97,04
15	BPSIP Banten	2.842	2.822	99,30	4.350	4.141	95,20	99	99	100	7.292	7.062	96,85
16	BPSIP Kalsel	4.042	3.965	98,10	4.354	4.134	94,94	1.107	1.106	99,88	9.503	9.205	96,86
17	BPSIP Jatim	6.113	6.034	98,71	10.136	9.693	95,63	548	548	100	16.797	16.275	96,89
18	BPSIP Jambi	3.779	3.746	99,14	4.914	4.656	94,75	100	100	100,00	8.792	8.502	96,70
19	BPSIP Maluku	2.891	2.869	99,25	4.121	3.894	94,48	-	-	-	7.012	6.763	96,45
20	BPSIP Sulteng	3.420	3.389	99,12	4.135	3.831	92,66	1.720	1.716	99,76	9.274	8.937	96,36
21	BPSIP DKI Jakarta	2.324	2.288	98,46	2.865	2.699	94,20	100	100	100,00	5.289	5.087	96,18
22	BPSIP Jateng	6.895	6.871	99,66	10.039	9.352	93,17	150	149	99,41	17.083	16.373	95,84
23	BBPSIP	5.153	5.107	99,11	20.505	19.411	94,67	491	491	100	26.149	25.009	95,64
24	BPSIP Gorontalo	2.973	2.895	97,36	3.274	3.066	93,66	75	75	100	6.322	6.036	95,47
25	BPSIP Sumut	4.435	4.347	98,03	4.801	4.462	92,95	110	110	100	9.345	8.920	95,44

No	Kode/ Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total		
		Pagu (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	%	Pagu (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	%	Pagu (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	%	Realisasi (Rp Juta)	%	
26	BPSIP Malut	2.092	2.056	98,25	3.529	3.312	93,87	-	-	-	5.621	5.368	95,50
27	BPSIP Sumsel	3.506	3.462	98,76	4.565	4.094	89,68	2.744	2.742	99,94	10.815	10.299	95,23
28	BPSIP Kaltim	4.798	4.725	98,47	4.575	4.134	90,35	-	-	-	9.373	8.858	94,51
29	BPSIP Babel	1.977	1.917	96,98	3.788	3.524	93,02	-	-	-	5.765	5.441	94,38
30	BPSIP Aceh	4.936	4.932	99,92	4.501	3.871	86,02	-	-	-	9.437	8.803	93,29
31	BPSIP Papua	3.657	3.643	99,60	4.635	3.828	82,60	2.558	2.556	99,93	10.850	10.027	92,42
32	BPSIP Papua Barat	1.631	1.613	98,89	4.170	3.322	79,68	4.087	4.087	100	9.887	9.022	91,25
33	BPSIP Sulbar	1.798	1.739	96,70	3.964	3.340	84,25	-	-	-	5.762	5.078	88,14
34	BPSIP Kepri	1.399	1.323	94,58	3.175	2.539	79,98	-	-	-	4.574	3.863	84,45
Total		137.670	136.355	99,04	199.561	187.099	93,76	16.540	16.520	99,88	353.771	339.974	96,10

Sumber data : Aplikasi OMSPAN 15 Januari 2024

3.2.1. Hibah Langsung Luar Negeri

BBPSIP mengelola kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, berdasarkan data OMSPAN, tahun 2023 dialokasikan di kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) melalui *capacity building* dan *partnership* yang didanai oleh *Asian Food And Agriculture Cooperaton Initiative* (AFACI) dengan total pagu sebesar Rp448.350.000,00 dengan realisasi Rp446.217.197,00 (99,52%). Data rinci terdapat pada Tabel 26.

Tabel 26. Hibah Langsung Luar Negeri Lingkup BBPSIP 2023

Kode	Satker/Program/Kegiatan/ KRO/RO/Komponen/ Sub Komponen/Akun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6916.AEF.109.051.N	Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes	448.350.000	446.217.197	99,52
521211	Belanja Bahan	111.666.000	111.424.000	99,78
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.750.000	2.750.000	100,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45.000.000	44.995.850	99,99
522151	Belanja Jasa Profesi	25.500.000	25.100.000	98,43
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.000.000	145.583.315	99,04
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.500.000	49.450.000	99,90
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya- Luar Negeri	66.934.000	66.914.032	99,97

Tahun 2023 merupakan kegiatan AFACI tahun pertama yang dikelola oleh BBPSIP yang bertujuan: 1) Mengidentifikasi calon lokasi penguatan (penumbuhan dan pengembangan Posluhdes), kebutuhan penguatan, dan potensial mitra penguatan dan 2) Meningkatkan pengetahuan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL), Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), dan petani di Posluhdes.

Identifikasi calon lokasi penguatan (penumbuhan dan pengembangan Posluhdes), kebutuhan penguatan, dan potensial mitra penguatan : 1) Terpilih 2 lokasi di Kabupaten Bogor, 2 lokasi di Kecamatan Tanah Baru Kabupaten Karawang, 2 lokasi di Kecamatan Tanah Laut Kabupaten Pleihari; 2) Kebutuhan penguatan teknis peternakan (pakan), pengendalian hama, pengembangan budidaya jamur, agribisnis rempah jahe, ICT dan *public speaking*, dan 3) Potensial mitra: swasta (PT Bintang Tojoe), penangkar, *champion*/pps (jamur, olahan rimpang, pakan), unit kerja teknis (UAT, TROA, PADI), Perbankan (BI), Pustaka (Literasi), Dinas Pertanian (kelembagaan).

Peningkatan pengetahuan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL), Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), dan petani di Posluhdes dihadiri oleh total 25 orang PPL, 8 orang PPS, *champion* dan petani 60 orang, dan 20 Kelompok Wanita Tani (KWT) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan antara 10-30% di setiap lokasi.

3.2.2. Pinjaman Luar Negeri

Pemerintah melalui BSIP mengembangkan berbagai model untuk mendukung rantai nilai pertanian berkelanjutan di 9 Provinsi terpilih melalui program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)* selama 5 tahun. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas Kementerian Pertanian dalam mendukung para pemangku kepentingan di sektor pertanian, membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim, dan mengurangi jejak karbon di beberapa rantai nilai. ICARE juga fokus pada memperkuat kapasitas sektor publik dan swasta untuk meningkatkan pertanian cerdas iklim di lokasi terpilih.

Pinjaman luar negeri berdasarkan data OMSPAN tahun 2023 dialokasikan di sembilan BPSIP dengan total pagu sebesar Rp15.300.000.000,00 dengan realisasi Rp15.225.205.452,00 (99,51%). Data rinci terdapat pada Tabel 27, sedangkan lokasi pelaksanaan ICARE dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 27. Pinjaman Luar Negeri Lingkup BBPSIP 2023

No	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Output	Realisasi Output	% capaian output
1	Jabar	1.700.000.000	1.699.651.237	99,98	1	1	100
2	Jatim	1.700.000.000	1.690.424.600	99,44	1	1	100
3	Lampung	1.700.000.000	1.691.519.566	99,50	1	1	100
4	Kalbar	1.700.000.000	1.695.912.324	99,76	1	1	100
5	Sulut	1.700.000.000	1.684.407.083	99,08	1	1	100
6	Sulsel	1.700.000.000	1.677.625.000	98,68	1	1	100
7	Sultra	1.700.000.000	1.695.247.649	99,72	1	1	100
8	NTB	1.700.000.000	1.694.108.944	99,65	1	1	100
9	Jateng	1.700.000.000	1.696.309.049	99,78	1	1	100
Lingkup BBSIP		15.300.000.000	15.225.205.452	99,51	9	9	100

Tabel 28. Lokasi pelaksanaan ICARE Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Komoditas
1	Ulu Belu, Air Nanningan dan Pulau Panggung	Tanggamus	Lampung	Kopi, ternak kambing
2	Cikajang, Cigedug, Cisurupan, Pasirwangi dan Sukaresmi	Garut	Jawa Barat	Kentang, ternak domba
3	Losari	Brebes	Jawa Tengah	Pisang, padi
4	Rembang, Sukorejo, dan Wonorejo	Pasuruan	Jawa Timur	Jagung, mangga
5	Tebas	Sambas	Kalimantan Barat	Jeruk, padi
6	Tombolo Pao dan Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan	Kentang, ternak sapi perah
7	Praya, Praya Barat, dan Praya Tengah	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Jagung, ternak ayam
8	Airmadidi, Kalawat, Talawaan, Dimembe, dan Kauditan	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Kelapa, jagung
9	Aere dan Lambandia	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	Kakao, sapi potong

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja lingkup BBPSIP menunjukkan bahwa kinerja kegiatan tahun 2023 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Realisasi keuangan lingkup BBPSIP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp339.974.584.461,00 dari total anggaran sebesar Rp353.771.118.000,00 dengan realisasi sebesar 96,1% dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Kegiatan Teknis.
2. Hasil pengukuran capaian kinerja lingkup BBPSIP tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 127,41% dengan kategori sangat berhasil.
3. Secara umum indikator kinerja lingkup BBPSIP telah memenuhi target dari Perjanjian Kinerja (PK) dengan perolehan nilai capaian kinerja > 100 persen (Sangat Berhasil) pada semua indikator yaitu:
 - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan nilai capaian 161,76%;
 - b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan nilai capaian 155,88%;
 - c. Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan nilai capaian 112,86%
 - d. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan nilai capaian 105,37%;
 - e. Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan nilai capaian 101,17%.
4. Capaian Kinerja yang dicapai lingkup BBPSIP merupakan hasil kinerja seluruh BPSIP dalam menghasilkan *output* pada indikator kinerja 1, 2 dan 3 pada butir 3. Sedangkan capaian kinerja yang dihasilkan oleh Satker BBPSIP adalah Indikator Kinerja 4 dan 5 pada butir 3.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan BBPSIP adalah :

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* di daerah dalam perencanaan kegiatan terkait lokasi, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan dan dukungan terhadap program daerah.

2. Setiap kegiatan memerlukan dukungan anggaran yang memadai, sumberdaya manusia yang handal dan ketrampilan yang cukup dalam pendampingan penerapan standar.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSIP Berdasarkan Permentan Nomor 13/Permentan/2023



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Jl. Tentara Pelajar No 10, Bogor 16114
Telepon (0251) 8351277, Faksimili (0251) 8350928
WEBSITE : www.bbp2p.itbang.pertanian.go.id; E-MAIL : bbp2p@yahoo.com, bbp2p@itbang.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fery Fahrudin Munier
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 17 Desember 2022

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Fery Fahrudin Munier

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (Nilai)	81
2	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	91,5

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Dukungan Manajemen	
Kegiatan: Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp 264.157.413.000*)

Bogor, 17 Desember 2022

Pt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian


Fadry Djufry


Fery Fakhudin Munier

*) Anggaran tersebut merupakan anggaran lingkup BBP2TP dan BPP2TP diberikan mandat sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh BPTP.

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi I)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

Jl. Tentara Pelajar No. 10, Bogor 16114
Telepon (0251) 8351277, Faksimil (0251) 8350928
WEBSITE: www.bbp2ip.litbang.pertanian.go.id, E-MAIL: bbpsip@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Ptl. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 17 Mei 2023

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Syamsuddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	34
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	167.607,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	81
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91,5

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	46.259.611.000*)
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	46.259.611.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	32.900.000.000*)
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	32.900.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	284.919.962.000*)
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	71.397.371.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	213.522.591.000

Bogor, 17 Mei 2023

Pit. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian



Fadry Djufry



Syamsuddin

*) Anggaran tersebut merupakan anggaran lingkup BBPSIP yang diberikan mandat sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seluruh BPSIP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2023

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	190,5
		Produksi Benih Jagung	Ton	38
		Produksi Benih Jeruk	Batang	10.000
		Produksi Benih Kopi	Pohon	95.500
		Produksi Benih Kelapa	Pohon	10.500
		Produksi Benih Kakao	Pohon	7.000
		Produksi Bibit Ayam KUB	Ekor	44.369
		Produksi Bibit Domba	Ekor	10
		TOTAL		

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi II)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
Jl. Tentara Pelajar No 10, Bogor 16114
Telepon (0251) 8351277, Faksimili (0251) 8350928
WEBSITE : www.bbp2tp.litbang.pertanian.go.id; E-MAIL : bbpsip@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Desember 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua


Fadry Djufry


Syamsuddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	34
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	167.610,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	81
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91,5

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	59.107.278.000*
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	59.107.278.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	32.474.589.000*
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	32.474.589.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	262.189.251.000*
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	71.009.818.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	191.179.433.000


*) Anggaran tersebut merupakan anggaran lingkup BBPSIP dan BBPSIP diberikan mandat sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh BPSIP

Jakarta, 28 Desember 2023

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian


Fadry Djufry


Syamsuddin

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2023

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	190,5
		Produksi Benih Jagung	Ton	38
		Produksi Benih Jeruk	Batang	10.000
		Produksi Benih Kopi	Pohon	95.503
		Produksi Benih Kelapa	Pohon	10.500
		Produksi Benih Kakao	Pohon	7.000
		Produksi Bibit Ayam KUB	Ekor	44.369
		Produksi Benih Domba	Ekor	10
		TOTAL		

No	Sasaran Program	IKSP/IKSK/IKK	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
							Fisik	Persen				
						B06 : Distribusi benih kegiatan perbenihan Tahun 2022 sebesar 60,50%	64,34	106,347				Distribusi benih tanaman pangan : 408,28 ton Distribusi benih tanaman hortikultura : 20.633 Kg, 6.500 batang, dan 7.500 G2 Distribusi tanaman perkebunan : 107.161 pohon.
						Kegiatan Perbenihan 2023 (15%)	13	86,67	Beberapa lokasi masih terdapat kegiatan IKM, sehingga masih menyesuaikan waktu tanam	Terus melakukan koordinasi dengan petani kooperatif		
						Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan : - Penanaman - Pemeliharaan (pemupukan dan penyulaman, pengendalian OPT) - Rouling - Peternakan : - Pemeliharaan						- Telah dilakukan dropping benih - Pergesahan benih - Persediaan calon benih
						B07 : Distribusi benih kegiatan perbenihan Tahun 2022 sebesar 65,50%	64,99	99,22				Pemeliharaan COD
						Kegiatan Perbenihan 2023 (30%)	28	93,33	Terjadi serangan hama dan OPT di beberapa lokasi	Penanganan dan pengendalian hama dan OPT secara intensif		Distribusi benih tanaman pangan : 408,28 ton Distribusi benih tanaman hortikultura : 20.633 Kg, 6.500 batang, dan 7.500 G2. Distribusi tanaman perkebunan : 109.161 pohon
						Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : - Okulasi/sambung pucuk - Pemeliharaan (pemupukan dan penyulaman, pengendalian OPT) - Rouling - Peternakan : - Pemeliharaan						Pemeliharaan tanaman
						Pemeliharaan : - Pemeliharaan						Pemeliharaan COD

No	Sasaran Program	IKS/IKSK/JKA	Sasaran	Target	Penanggung jawab	Uraian Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangannya/Evidence	
							Fisik	Persentase					
						B08 : Distribusi benih kegiatan perbenihan sebesar 70%	69,07	98,67				Distribusi benih tanaman pangan : 415,39 ton Distribusi benih tanaman hortikultura : 20,630 Kg, 6.500 batang dan 16.550 GZ. Distribusi tanaman perkebunan : 109,161 pohon	
						Kegiatan Perbenihan 2023 (50%)	53	106				Pemupukan	
						Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : - Perbenihan (memupukan dan penyulaman), pengendalian OPT) - Peternakan : - Pemeliharaan			Terjadi serangan hama di beberapa lokasi - Terjadi kesulitan sumber air			Pemeliharaan DOC	
						B09 : Distribusi benih sebesar 76%	69,08	90,89					Distribusi benih kegiatan tahun 2022 : tanaman pangan : 423,96 ton Distribusi benih tanaman hortikultura : 20,630 Kg, 6.500 batang dan 16.550 GZ. Distribusi tanaman perkebunan : 109,161 pohon
						Produksi benih tersertifikasi sebesar 60%	1.252927	2,09				Produksi benih terstandar kegiatan tahun 2023 : Produksi peternakan : 2100 ekor	
						Tanaman Pangan : - Panen dan pasca panen - Processing - Sertifikasi			Kekurangan pada lahan produksi Adanya serangan hama			sebagian besar sudah dilaksanakan panen untuk MT 1	
						Hortikultura dan Perkebunan : - Sertifikasi Peternakan : - Pemeliharaan - Seleksi Indukan			Harga pakan mahal			sebagian besar dalam tahap proses pemasaran Sebagian besar dalam tahap proses penetasan telur	

No	Sasaran Program	IKS/IKSJ/JKA	Sasaran	Target	Penanggung jawab	Uraian Keberhasilan		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
						Fisik	Capaian Persen				
						B10 : Distribusi benih sebesar 80%	49,91	62,39			Distribusi benih kegiatan tahun 2022 : tanaman pangan : 423,12 ton Distribusi benih tanaman hortikultura : 20.630 Kg, 6.500 batang dan 16.550 GZ. Distribusi tanaman perkebunan : 109.161 pohon
											Distribusi benih kegiatan tahun 2023 : tanaman pangan : 11,9 ton Distribusi peternakan :41.100 ekor
						Produksi benih tersertifikasi sebesar (75%)	40,14	53,52			Produksi benih terstandar kegiatan tahun 2023 : tanaman pangan :57,9 ton. Produksi tanaman perkebunan : 26.115 pohon. Produksi peternakan : 41.100 ekor
						Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan : - Sertifikasi - Distribusi			Adanya serangan hama	Usaya pengendalian telah dilakukan dengan petugas di lapangan dan petani kooperatif	
						Peternakan : - Pemeliharaan - Seleksi Indukan			"Standar kandang belum sesuai dengan kebutuhan jumlah ayam dan ketersediaan bemacin-macin jenis ayam KUB -Harga Pakan Luber dan Toko yang tinggi.	1. Membagi ayam di dalam kandang untuk mengurangi kambai dan kematian 2. Melakukan pengawasan dan pemberian obat dan vitamin secara berkala 3. Memanfaatkan sumber pakan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pakan harian ayam KUB	

No	Sasaran Program	IKSP/IKSK/IKCA	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan		Permasalahan	Tindakan	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
						Capaian Fisik	Persen				
						B 11	Distribusi benih sebesar 83%	52.03	65.04		Distribusi benih kegiatan tahun 2022 : tanaman pangan : 534 ton Distribusi benih tanaman Hortikultura : 20.033Kg, 6.500 bekal dan 16.530 Gz. Distribusi tanaman perkebunan : 109.161 pohon
											Distribusi benih kegiatan tahun 2023 : tanaman pangan : 14 ton Distribusi pelemakan : 49.256 ekor
							Produksi benih tersertifikasi sebesar (80%)	40.8	51.0		Produksi benih terstandar kegiatan tahun 2023 : tanaman pangan :71 ton. Produksi tanaman perkebunan : 26.115 pohon. Produksi pelemakan : 49.261 ekor
							Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : - Distribusi				
								-Adanya searangan hama pada padi -Pergerakan cuaca yang tidak stabil menyebabkan benih tidak dapat berkecambah dengan baik -Cucaca yang sangat panas menyebabkan benih kepal yang baru pindah tanam ke polibag menjadi layu r.	-Monitoring OPT secara rutin, sanitasi lingkungan, aplikasi pestisida, dan abatisasi busilika - Pencapaian penyeder dengan penyederan dengan dan pemulakan dengan Zr -Pemeliharaan benih kepal di polibag, penyemprotan HPT, yang baru pindah tanam ke polibag menjadi layu r.		
							Pelemakan : - Penetasan dan Produksi DOC - Distribusi DOC				
								Temak ayam terserang pullorum, yang menyebabkan performa ayam menurun dan banyak menyebabkan kematian temak	Sanitasi kandang, pemisahan temak sakit dan pemberian obat-obatan		

No	Sasaran Program	IKSP/IKSW/IKA	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
							Fisik	Person				
						B12 : Distribusi benih sebesar 85%	74,28	87,39				Distribusi benih kegiatan tahun 2022 : tanaman pangan : 534 ton Distribusi benih tanaman hortikultura : 20.633Kg, 6.500 batang dan 16.550 GZ. Distribusi tanaman perkebunan : 109.161 pohon
												Distribusi benih kegiatan tahun 2023 : Tanaman pangan: 95,87 ton Hortikultura : 10.000 kg Perkebunan : 78.913 batang Peternakan : 46.921 ekor
						Produksi benih tersertifikasi (85%)	109,28	128,565				Produksi benih, terstandar kegiatan tahun 2023 : tanaman pangan : 194, 47 ton Hortikultura : 10.000 kg perkebunan : 116,929 batang peternakan : 56,045 ekor
						Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : - Distribusi			Lahan sempat mengalami kekeringan karena rendahnya curah hujan. Dampak dari kekeringan ini menyebabkan stres pada tanaman dan memperlambat pertumbuhan tanaman yang disebabkan oleh cerataman.	monitoring OPT secara rutin, sanitasi lingkungan, aplikasi pestisida, dan aplikasi biosilika.		
						Peternakan : - Penetasan dan Produksi DOC - Distribusi DOC			Bahan untuk pembuatan ransum sulit di peroleh dan harga mahal, sehingga masih mencari alternatif bahan pakan yang murah yang ada di lapangan	alternatif lagi dengan membuat ransum pakan lokal		

Lampiran 6. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2023

**MANUAL IKA
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	01
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Rasio rencana aksi manajemen perubahan yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi manajemen perubahan
Definisi	Perbandingan capaian realisasi kegiatan terhadap total rencana kegiatan manajemen
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan
Formula/Cara menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Rencana Aksi}} \times 100$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber Data	Sub Bag Kepegawaian, Sub Bag Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sub Bag Keuangan
Cara pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target Rencana Aksi manajemen perubahan sebagai penyebut 2. Menghitung capaian realisasi Rencana Aksi manajemen perubahan sebagai pembilang 3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%)
Catatan khusus	
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian Tata Usaha

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	02
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Rasio rencana aksi penataan tata laksana yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi penataan tata laksana
Definisi	Perbandingan capaian realisasi kegiatan terhadap total rencana kegiatan tata laksana
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan yang mendukung pelaksanaan: reformasi birokrasi, WBK WBBM, SPI dan ZI
Formula/Cara menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Rencana Aksi}} \times 100$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber Data	Sub Bag Kepegawaian
Cara pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target Rencana Aksi penataan tata laksana sebagai penyebut 2. Menghitung capaian realisasi Rencana Aksi penataan tata laksana sebagai pembilang 3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%)
Catatan khusus	
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian Tata Usaha

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	03
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Rasio rencana aksi penataan Sumberdaya manusia yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi penataan sumberdaya manusia
Definisi	Perbandingan capaian realisasi kegiatan terhadap total rencana kegiatan penataan sumberdaya manusia
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan
Formula/Cara menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Rencana Aksi}} \times 100$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber Data	Sub Bag Kepegawaian
Cara pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target Rencana Aksi penataan Sumberdaya manusia sebagai penyebut 2. Menghitung capaian realisasi Rencana Aksi penataan Sumberdaya manusia sebagai pembilang 3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%)
Catatan khusus	
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian Tata Usaha

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	04
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Rasio rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik
Definisi	Perbandingan capaian realisasi kegiatan terhadap total rencana kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan
Formula/Cara menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Rencana Aksi}} \times 100$
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber Data	Sub Pendayagunaan Hasil Pertanian
Cara pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Target Rencana Aksi peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai penyebut 2. Menghitung capaian realisasi peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pembilang 3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%)
Catatan khusus	
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian KSPP

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	05
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Tingkat kepuasan unit kerja/UPT lain di lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap layanan Bagian Tata Usaha Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Definisi	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan unit kerja/UPT lain di lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap layanan Bagian Tata Usaha Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang diperoleh dari hasil survey kepuasan.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKA	Hasil survei kepuasan dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap layanan Bagian TU Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Formula/Cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kuisisioner tingkat kepuasan terhadap layanan Bagian TU 2. Setiap pertanyaan kita kasih skor dengan skala likert (1-5) yang menggambarkan tingkat atau skala kepuasan mulai dari tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas dan sangat puas; 3. Setiap pertanyaan dihitung/rekap skor nilainya dengan cara: jumlah (masing-masing skala dikalikan jumlah responden yang menjawab)/Total Responden; 4. Indeks kepuasan dihitung dari rata-rata skor dari seluruh pertanyaan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber Data	Bagian Tata Usaha
Cara pengambilan data	Melakukan survei kepuasan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap layanan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Catatan khusus	Pengambilan data berkoordinasi dengan Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian Tata Usaha

MANUAL IKU KEPALA BALAI BESAR DAN KEPALA BALAI

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)
Definisi	Jumlah SNI eksisting yang didiseminasikan pada tahun berjalan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian melalui bimbingan teknis, media cetak, media elektronik, penyuluhan, pameran dll yang disampaikan kepada stakeholder (penyuluh, dinas, gapoktan, poktan, UMKM, dan pelaku usaha lainnya).
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah SNI yang disebarluaskan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	BPSIP
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah SNI yang disebarluaskan pada tahun berjalan melalui dokumen kegiatan didiseminasi
Catatan khusus	SNI yang disebarluaskan pada tahun sebelumnya dapat disebarluaskan kembali pada tahun berikutnya di lokasi yang berbeda
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	BBPSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (lembaga)
Definisi	Lembaga adalah pelaku utama dan atau pelaku usaha berbadan hukum yang didampingi oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dalam menerapkan standar instrument pertanian.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian pada tahun berjalan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	BPSIP
Cara pengambilan data	Menghitung Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian pada tahun berjalan melalui laporan kegiatan pendampingan penerapan standar instrument pertanian
Catatan khusus	Pemilihan Lembaga yang didampingi mengikuti persyaratan di dalam JUKLAK
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	BBPSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Tersandar yang dihasilkan (Unit)
Definisi	Produk instrumen pertanian tersandar berupa benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bibit ternak yang telah bersertifikat.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Data jumlah produksi benih dan bibit bersertifikat yang dihasilkan
Formula/Cara menghitung	Jumlah produksi benih dan bibit bersertifikat yang dihasilkan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	BPSIP
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah produksi benih dan bibit bersertifikat yang dihasilkan
Catatan khusus	Jika benih/bibit tahun berjalan belum tersertifikasi dapat menggunakan data potensi benih yang akan tersertifikasi.
Pihak yang melaku-kan pengukuran IKSK/sumber IKSK	BBPSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)
Definisi	Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal
Formula/Cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB Badan Litbang Pertanian
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Tim Inspektorat Jenderal dan Tim Penilai Balitbangtan
Cara pengambilan data	Melalui pemeriksaan dan survey Tim Penilai PNPRB Itjen dan Tim Penilai BPSIP ke Satker
Catatan khusus	<p>Perhitungan nilai ZI menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021.</p> <p>Penetapan WBK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5. <p>Penetapan WBBM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan 3. Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; 4. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim Penilai PMPRB Itjen dan Tim Penilai BBPSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	05
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku)
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. 2. Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang tercantum dalam SMART/Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja sesuai PMK yang berlaku
Formula/Cara menghitung	Nilai kinerja Anggaran secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Aplikasi SMART
Cara pengambilan data	Mengentry rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada aplikasi SMART, sehingga akan keluar nilai kinerja secara otomatis dari aplikasi tersebut
Catatan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik 3. $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal 4. $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang 5. $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melaku-kan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Kemenkeu

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Capaian kinerja keuangan BBPSIP berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Hasil efisiensi dan nilai efisiensi dapat diukur dari perhitungan anggaran, realisasi, dan volume terhadap kelima indikator kinerja tahun berjalan, yaitu: (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, (2) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian, (3) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, (4) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, dan (5) Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Berdasarkan perhitungan tersebut, pagu anggaran efisiensi sebesar Rp 353,77 milyar dengan realisasi sebesar Rp 339,97 milyar (96,1%).

Kinerja capaian fisik indikator kinerja BBPSIP secara umum dapat mencapai target, bahkan ada beberapa yang melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk indikator jumlah produk instrumen pertanian terstandar khususnya untuk produk instrumen tanaman pangan tidak dapat mencapai target. Hal disebabkan karena adanya *el nino* pada beberapa daerah, sehingga tidak dapat memproduksi benih padi dan jagung. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi tersebut, kisaran efisiensi untuk masing-masing indikator berkisar antara -7,80 sampai 20,00. Secara rinci capaian efisiensi masing-masing indikator kinerja adalah; (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebesar 20,00 (2) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian sebesar 20,00, (3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan sebesar -7,80, (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian sebesar 1,02, dan 5) Indikator nilai kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian 5,87.

Jika dibandingkan antara sumber anggaran yang dialokasikan dengan hasil (*output*) kinerja yang dicapai, maka BBPSIP dapat dikategorikan berhasil dalam menjalankan efisiensi dalam mencapai kinerjanya. Hal ini didasari dari pengertian mengenai efisiensi, yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Atau dengan kata lain, efisiensi dapat diterjemahkan sebagai perbandingan *output* terhadap input. Berdasarkan rumus perhitungan efisiensi, nilai efisiensi BBPSIP setara dengan 20% atau nilai efisiensi sebesar 100%.

Secara rinci nilai efisiensi indikator kinerja terlampir.

NILAI EFISIENSI INDIKATOR KINERJA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian ((7)-(6)/(5)*100)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Capaian x Alokasi (10)=(7)x(8)	(Capaian x Alokasi) - Realisasi (11)=(10)-(9)	Efisiensi (12)=(11)/(8)*100	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan						39.107.159.000	28.257.640.209	72,3%	46.928.590.800	18.670.950.591	20,00	50,50
			Standar	34	50	120	3.531.080.000	3.514.613.577	99,5%	4.237.296.000	722.682.423		
				18.540	24.067	120	31.792.918.000	20.968.971.984	66,0%	38.151.501.600	17.182.529.616		
			Orang				3.783.161.000	3.774.054.648	99,8%	4.539.793.200	765.738.552		
			Unit	16	21	120	20.000.119.000	19.887.701.818	99,4%	24.000.142.800	4.112.440.982	20,00	50,50
2	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian												
			Lembaga	34	53	120	4.700.119.000	4.662.496.366	99,2%	5.640.142.800	977.646.434		
			Lembaga	9	13	120	15.300.000.000	15.225.205.452	99,5%	18.360.000.000	3.134.794.548		
3	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan												
			Unit	228,50	201,99	88,40	32.474.589.000	32.168.543.752	99,1%	29.634.269.859	(2.534.273.893)	-7,80	30,49
			Unit				28.724.838.000	28.506.664.333	99,2%	25.392.253.950	(3.114.410.383)		

No	Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian ((7)=(6)/(5)*100)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Capaian x Alokasi - Alokasi ((10)=(7)x(8))	(Capaian x Alokasi) - Realisasi ((11)=(10)-(9))	Efisiensi ((12)=(11)/(8)*100)	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar	Unit	113003,00	116930,00	103,48	1.377.834.000	1.370.475.979	99,5%	1.425.715.509	55.239.530		
		Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar	Unit	10000,00	10000,00	100,00	150.000.000	149.617.225	99,7%	150.000.000	382.775		
		Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar	Unit	44379,00	62041,00	120	2.221.917.000	2.141.786.215	96,4%	2.666.300.400	524.514.185		
4	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian						232.610.902.000	230.240.373.970	99,0%	3.125.434.000	2.370.528.030	1,02	52,55
		Layanan BMN	Layanan	31	31		2.675.434.000	2.625.037.733	98,1%	2.675.434.000	50.396.267		
		Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100	300.000.000	299.888.504	100,0%	300.000.000	111.496		
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100	150.000.000	146.924.000	97,9%	150.000.000	3.076.000		
		Layanan Umum	Layanan	33	33	100	7.591.018.000	7.510.020.905	98,9%	7.591.018.000	80.997.095		
		Layanan Perkantoran	Layanan	36	36	100	148.556.243.000	146.498.151.570	98,6%	148.556.243.000	2.058.091.430		
		Layanan Perkantoran	Layanan	34	34	100	71.009.818.000	70.873.899.857	99,8%	71.009.818.000	135.918.143		
		Layanan Manajemen SDM	Layanan	1884	1884	100	2.328.389.000	2.286.451.401	98,2%	2.328.389.000	41.937.599,00		

No	Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian ((7)=(6)/(5))*100)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Capaian x Alokasi ((10)=(7)x(8))	(Capaian x Alokasi) - Realisasi ((11)=(10)-(9))	Efisiensi ((12)=(11)/(8))*100	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian						29.578.349.000	129.420.324.712	99,5%	25.917.362.250	1.735.092.538	5,87	64,67
		Layanan Sarana Internal	Unit	11	11	100	140.007.000	140.000.000	100,0%	140.007.000	7.000		
		Layanan Prasarana Internal	Unit	8	9	113	12.616.546.000	12.606.101.058	99,9%	14.193.614.250	1.587.513.192		
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	35	35	100	11.583.741.000	11.491.381.092	99,2%	11.583.741.000	92.359.908		
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	34	34	100	2.259.251.000	2.240.619.896	99,2%	2.259.251.000	18.631.104		
		Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	34	34	100	2.978.804.000	2.942.222.666	98,8%	2.978.804.000	36.581.334		
		TOTAL				106	353.771.118.000	339.974.584.461	96,3%	374.723.360.446	34.748.775.985		



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**